

5. Doni Akbar, S.E.
6. Trifena M. Tinal, B.Sc.
7. Nusron Wahid
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-P.GERINDRA)
5 dari 7 orang Anggota
 1. Andre Rosiade
 2. Khilmi
 3. Ir. H. La Tinro Tunrung
 4. Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.
 5. M. Husein Fadlulloh B.Bus.,
M.M.,M.B.A.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM
(F-P.NASDEM)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Martin Manurung, S.E., M.A.
 2. H. Subardi, S.H., M.H.
 3. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
 4. Muhammad Rapsel Ali
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)
4 dari 6 orang Anggota
 1. Ir. H.M. Nasim Khan
 2. Tommy Kurniawan
 3. Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos.,
M.Si.
 4. Siti Mukaromah, S.Ag.,M.A.P.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
4 dari 5 orang Anggota
 1. DR. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
 2. H. Anton Sukartono Suratno, M.Si.
 3. Hj. Melani Leimena Suharli
 4. Putu Supadma Rudana
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS)
4 dari 4 orang Anggota
 1. Amin, AK., M.M.
 2. Hj. Nevi Zuairina
 3. Rafli
 4. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.
8. FRAKSI PARTAI AMANAT
NASIONAL (F-PAN)
2 dari 5 orang Anggota
 1. Abdul Hakim Bafagih
 2. Daeng Muhammad, S.E., M.Si.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. Elly Rachmat Yasin

B. LEMBAGA NEGARA;

C. PEMERINTAH;

D. UNDANGAN YANG LAIN.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (ARIA BIMA / F-PDIP):

Pada pagi hari ini, hari ini kita rapat dengan BSN, dengan KPPU dan BP Batam, serta dengan BPKS. Laporan Sekretariat, 8 Poksi atau Fraksi sudah hadir dan kuorum bisa terpenuhi untuk rapat ini dibuka.

Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Selasa 19 Januari 2021.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita semua.

Om Swastiastu.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.

Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Badan Standardisasi Nasional, Bapak Kukuh S. Ahmad, dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bapak Guntur Syahputra Saragih, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ini, Bapak Kurnia Toha?

WAKIL KETUA KPPU (GUNTUR SYAHPUTRA SARAGIH):

Sudah tidak lagi Pak Ketua Pimpinan.

KETUA RAPAT (ARIA BIMA):

Diwakili oleh.

WAKIL KETUA KPPU (GUNTUR SYAHPUTRA SARAGIH):

Pak Kurnia Toha sudah tidak ketua lagi mungkin masih belum *update* Pak Ketua, kita pertengahan kemarin periode kita sudah pergantian.

KETUA RAPAT:

Ok.

Jadi sekarang yang hadir adalah Bapak Guntur Syahputra Saragih?

WAKIL KETUA KPPU (GUNTUR SYAHPUTRA SARAGIH):

Iya Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ketuanya sekarang?

WAKIL KETUA KPPU (GUNTUR SYAHPUTRA SARAGIH):

Pak Kodrat Wibowo.

KETUA RAPAT:

Kodrat Wibowo.

Selamat datang kami ucapkan juga kepada yang terhormat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bapak Muhammad Rudi.

KEPALA BP BATAM (MUHAMMAD RUDI):

Assalamualaikum, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Apakah sudah hadir secara virtual?

KEPALA BP BATAM (MUHAMMAD RUDI):

Lengkap kota Batam, kami lengkap Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Dan selamat datang kepada yang terhormat Saudara Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Bapak Iskandar Zulkarnain, dan beserta seluruh jajaran yang hadir secara virtual maupun secara fisik. Dari sebelah kiri ada Ibu Hj. Nevi Zuariana, Salam Bu, dan sebelah kiri juga hadir Pak Tommy Kurniawan, dari sebelah kanan DR. Ir. Herman Khaeron, M.Si.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Assalamualaikum.

KETUA RAPAT:

Dan juga sebelah kanan hadir Ketua Poksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, Dapil Sumatera Barat 1, dengan perolehan suara terbesar.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari ini, dalam keadaan sehat walafiat, serta terhindar dari segala halangan termasuk dari wabah Covid-19 yang akhir-akhir ini kita semakin waspada karena penularan-penularan yang kelihatannya semakin hari, kalau tidak salah tadi malam penambahan sudah 14.000 walaupun yang sembuh juga cukup banyak.

Perlu kami sampaikan bahwa kondisi ini memang tidak kondusif terkait dengan penyebaran virus Covid-19 yang saat ini kita semua bergotongroyong dari pemerintah dari jajaran, berbagai ormas dan masyarakat berusaha untuk mengatasi baik itu virusnya, penularannya maupun dampaknya termasuk DPR. Kita tetap melakukan rapat-rapat yang dilakukan oleh Alat-alat Kelengkapan Dewan dan dengan mitra dalam hal ini Pemerintah yang mana dengan tetap jaga kesehatan dan tetap menjalankan tugas amanat rakyat untuk melakukan berbagai fungsi-fungsi, baik itu pengawasan, anggaran, maupun fungsi legislasi terutama hal-hal yang terkait dengan pengatasan persoalan Covid-19 ini.

Ketentuan-ketentuan rapat hari ini semua diatur secara konstitusional *formal* dalam Peraturan DPR nomor 1/2014 tentang Tata Tertib. Kemudian rapat juga selalu dilakukan secara terbuka, transparan, walaupun tetap menjaga protokol kesehatan dengan *live streaming* oleh TV Parlemen, media cetak dan elektronik lainnya akan mendapatkan sumber berita dari TV Parlemen, karena situasinya memang kita jaga untuk tidak terlalu banyak ada di dalam ruangan komisi.

Di dalam tata tertib Peraturan DPR Nomor 1/2014 juga sudah menyebutkan bahwa pengadministrasian setiap anggota yang menandatangani daftar hadir, saat ini sudah disesuaikan dengan kehadiran lewat media elektronik atau secara elektronik yang mana di dalam kehadiran anggota tercatat di dalam *list* partisipasi dalam aplikasi Zoom.

Kita tetap mengikuti protokol kesehatan baik mitra, maupun anggota, maupun sekretariat, hanya 20% mitra kerja, anggota maupun sekretariat, yang mengikuti rapat secara fisik dan rekaman rapat dilakukan oleh Sekretariat Komisi VI dan di akhir rapat itu semua tersimpan dalam aplikasi Zoom.

Selanjutnya, kami ingin sampaikan bahwa keadaan fisik dalam rapat-rapat kami sepatutnya tetap dilakukan dengan hal-hal yang terkait dengan protokol kesehatan. Dan saat ini kita mulai menerapkan secara ketat termasuk kita usaha rapat hari ini berusaha untuk tidak lebih dari 2,5 jam untuk bisa selesai. Dan alur rapat nanti akan kami persilakan untuk mitra menyampaikan presentasi secara singkat kurang lebih 5 menit nanti ada tanggapan, saya harapkan saya ratakan aja minimal satu-satu masing-masing

poksi yang panjangnya disesuaikan dengan jumlah anggota masing-masing poksi yang tentunya ditentukan secara berimbang.

Menurut laporan yang ada, rapat ini bisa saya buka karena sudah memenuhi rapat kuorum fraksi maka sesuai Pasal 281 Ayat (1) Peraturan DPR Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka perkenankan kami untuk membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.17 WIB)

Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada BSN, KPPU, BP Batam dan Kepala BPKS atas kehadirannya baik secara fisik maupun secara virtual, guna membahas evaluasi kegiatan dan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021.

Untuk itu kami ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat pada hari ini bisa kita akhiri saya tetapkan dulu aja pukul 12.00 ya?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya kami mempersilakan, selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Kepala Badan Standardisasi Nasional Bapak Kukuh S. Achmad untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan.

KEPALA BSN (KUKUH S. ACHMAD):

Baik.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang terhormat Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang saya muliakan.

Yang kami hormati juga Wakil Ketua KPPU, Kepala BP Batam, dan Kepala BPKS Sabang, dan

Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua.

Syaloom.

Om Swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat di masa pandemi Covid-19 untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Badan Standardisasi Nasional dengan Komisi VI DPR RI dalam pembahasan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020, serta rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021.

Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati,

Kami sampaikan bahwa pada tahun 2020, BSN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp246.863.909.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2020, sebesar Rp245.297.832.349,- atau sebesar 99,37%, yang terdiri dari 2 program sebagai berikut, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya, sebesar Rp135.230.563.000,- dengan realisasi Rp134.402.442.223,- atau sebesar 99,36%. Dan yang kedua untuk Program Pengembangan Standarisasi Nasional sebesar Rp111.633.346.000,- dengan realisasi Rp110.895.390.126,- atau sebesar 99,34%.

Slide berikutnya adalah realisasi untuk masing-masing unit kerja. Saya mohon ijin untuk langsung kepada *slide* terkait dengan capaian *output* pada tahun 2020, *slidenya* bisa dilanjutkan. Ya, capaian *output* BSN tahun 2020 kami gambarkan dalam infografis sebagai berikut. Jadi di masa pandemi Covid-19, BSN telah berhasil mencapai berbagai capaian *output* di antaranya adalah penyusunan sebanyak 461 dokumen SNI yang kurang lebih 30 di antaranya adalah SNI yang terkait dengan penanganan Covid-19.

Kemudian restrukturisasi terhadap komite teknis yang melakukan penyusunan SNI ada 152 komite teknis, kemudian penyusunan 14 regulasi di bidang standarisasi, kemudian harmonisasi terhadap 10 regulasi yang ditetapkan oleh kementerian dan lembaga untuk disesuaikan dengan prinsip *good regulatory practices*.

Kemudian akreditasi kepada 143 lembaga penilaian kesesuaian yang terdiri dari laboratorium, lembaga sertifikasi, dan lembaga inspeksi. Kemudian juga melakukan *assesment* atau audit ke 509 lembaga sertifikasi dan lembaga sertifikasi serta 1.104 laboratorium secara terutama secara *remote assesment* atau asesmen jarak jauh selama masa pademi.

Kemudian ada 4 penelitian standardisasi, ada 3 kelompok pelatihan standardisasi yang jumlah pelatihannya adalah 54 pelatihan terdiri dari, pelatihan untuk masyarakat umum melalui PNBPN, kemudian pelatihan untuk para atau SDM internal yang menangani standardisasi, dan pelatihan untuk SDM eksternal yang menangani standardisasi dan penilaian kesesuaian. Kemudian pengembangan sistem informasi SPK, sistem atau standardisasi dan penilaian kesesuaian, pemeliharaan pengakuan internasional terhadap 14 skema akreditasi dan penyusunan 30 skema penerapan standar yang utamanya adalah SNI-SNI yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19.

Kemudian melayani 13.445 *stakeholder* terkait dengan standarisasi yang kita lakukan di 5 kantor layanan teknis yang berada di Pekanbaru, di Palembang, di Bandung, di Surabaya dan di Makassar. Kemudian pembinaan kepada pelaku usaha terutama UMKM sebanyak 249, kemudian peningkatan atau pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran standar nasional satuan ukuran kita, yang berlokasi di kawasan Puspiptek di Serpong dan juga selesainya pembangunan laboratorium standar nasional satuan ukuran.

Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati,

Pada tahun 2020, BSN juga mendapat beberapa penghargaan terkait dengan kinerja anggaran maupun kinerja substansi. Yang pertama pada tanggal 1 September 2020 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, pada 22 September 2020 memperoleh gelar urutan ketiga atas Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara dari *BMN Award* yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, dan menjelang akhir tahun 21 Desember 2020, 2 unit kerja di BSN yaitu Direktorat Akuntansi Laboratorium dan Direktorat Akuntansi Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi berhasil mendapatkan penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi atau WBK dari Kementerian PAN RB.

Bapak, Ibu Pimpinan dan anggota DPR RI Komisi VI DPR RI yang kami hormati,

Terkait dengan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S903/MK.02/2020 tentang Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian Lembaga Tahun Anggaran 2021, BSN memperoleh pagu alokasi anggaran tahun 2000, Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp265.996.133.000,-. Kemudian BSN mendapat surat berikutnya dari Menteri Keuangan Nomor S30/MK.02/2021 tentang *Refocusing* dan *Realokasi* Anggaran KL dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran KL Tahun 2021 bahwa BSN harus melakukan penghematan atau realokasi anggaran sebesar Rp37.192.199.000,- atau kurang lebih 14% dari pagu awal.

Oleh karena itu, Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati, per hari ini kita sudah menginformasikan kepada Kementerian Keuangan tentang *refocusing* tersebut dengan komposisi untuk dua program, yaitu program dukungan manajemen yang tadinya Rp154.342.268.000,- kemudian di potong menjadi Rp137.752.213.000,- kemudian untuk program standarisasi nasional dari Rp111.653.865.000,- menjadi Rp91.051.721.000,-

Slide berikutnya.

Bapak Ibu sekalian,

Adalah rincian *refocusing* untuk masing-masing unit kerja baik Eselon 1 maupun Eselon 2 di BSN. Mungkin saya ingin fokus kepada *slide* terkait dengan anggaran BSN per Eselon 1. Jadi yang pertama adalah untuk Sekretariat Utama yang semula adalah Rp154.342.268.000,- menjadi Rp137.752.213.000,- yang nantinya digunakan untuk SDM, kemudian hukum, kemudian reformasi birokrasi, kemudian terkait dengan keuangan, fasilitas perkantoran dan tentu saja adalah gaji para ASN, termasuk tunjangan kinerja, termasuk juga untuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat di BSN.

Terkait dengan Program Standarisasi Nasional, Sekretariat Utama BSN juga mengelola kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan riset dan pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan outputnya adalah 16 kegiatan penelitian SPK dan pelatihan bidang industri kepada 1.590 orang.

Yang berikutnya untuk anggaran Eselon 1 Deputi bidang Pengembangan Standar pagu awal adalah Rp12.375.000.000,- kemudian menjadi Rp5.970.037.000,- dan kegiatan ini nantinya akan diharapkan menghasilkan 220 SNI terkait dengan standar agrokimia, kesehatan dan

halal, kemudian 175 SNI terkait mekanika, energi, elektroteknika, transportasi dan teknologi informasi. Kemudian 170 SNI bidang infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif.

Kemudian untuk Deputi bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian semula anggaran adalah Rp15.015.800.000,- menjadi Rp8.433.034.000,-. Ini akan menghasilkan output direncanakan adalah 250 pembinaan pelaku usaha terutama UMKM, kemudian pelayanan kepada 1.500 *stakeholder* melalui 5 kantor layanan teknis yang berada di Pekanbaru, Palembang, Bandung, Surabaya dan Makassar.

Kemudian juga penyusunan 144 kebijakan penerapan standar dan 15 tata kelola SPK untuk organisasi maupun lembaga pemerintah. Kemudian Eselon 1 berikutnya adalah Deputi di bidang Akreditasi sebesar Rp18.950.204.000,-. Karena Deputi di bidang Akreditasi pengelolaan anggarannya adalah melalui PNPB dan sesuai ketentuan dari Menteri Keuangan bahwa anggaran PNPB tidak dilakukan pemotongan, tidak boleh dilakukan pemotongan, karena itu anggaran di kedeputan bidang akreditasi praktis tidak mengalami penurunan atau tetap seperti pagu awal yang diharapkan akan digunakan untuk melakukan akreditasi terhadap 1.095 laboratorium, kemudian juga 470 untuk akreditasi terhadap lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.

Yang terakhir adalah untuk Deputi bidang Standar Nasional Satuan Ukuran, dengan output 20 kemampuan pengukuran bidang mekanika radiasi dan biologi untuk bisa diakui atau ditambahkan pengakuannya di tingkat internasional, dan juga 52 kemampuan pengukuran di bidang termoelektrik dan kimia dengan anggaran awalnya Rp47.506.898.000,- turun menjadi Rp44.805.357.000,-. Jadi karena di kedeputan SNSU, masuk salah satu menjadi program prioritas nasional, ini pemotongannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan di unit yang lainnya.

Bapak Ibu Pimpinan dan anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati,

Anggaran prioritas nasional di BSN mengalami perubahan tadi terkait dengan beberapa kegiatan, untuk penguatan penerapan standarisasi dan penilaian kesesuaian terutama untuk pembinaan non UMKM, kemudian untuk penelitian dan pelatihan, kemudian sistem penerapan standarisasi, kemudian sistem dan harmonisasi akreditasi, kemudian terkait juga dengan perumusan dan penetapan SNI, dan juga penyediaan sarana bidang industri untuk perdagangan dalam rangka peningkatan standar nasional satuan ukuran.

Yang terakhir.

Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Mohon ijin kami sampaikan bahwa pada tahun 2019 BSN dalam mendukung program pemerintah tahun 2021 akan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. Terkait dengan Standar Nasional Indonesia adalah percepatan perumusan SNI untuk bidang alat kesehatan termasuk nantinya merumuskan SNI ISO 45.005 sebagai panduan pelaksanaan bekerja dengan sistem WFO dan WFH. Kemudian pembinaan *role model* UMKM yang berorientasi ekspor dan juga UMKM untuk alat kesehatan.

Kemudian pelaksanaan akreditasi ke laboratorium, lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi melalui *remote assessment*, atau *assessment* jarak jauh menggunakan perangkat teknologi informasi, kemudian pengadaan peralatan laboratorium SNSU, khususnya untuk bidang biologi dan alat kesehatan yang belum tersedia di Indonesia.

Kemudian penerapan SNI ISO 29963 2017 untuk peningkatan kualitas pendidikan pelatihan nonformal, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran pengembangan SDM terutama pendidikan vokasi. Kemudian dukungan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, dalam hal percepatan perumusan SNI, sektor usaha, pendampingan pelaku usaha, dan penyiapan infrastruktur, serta penjaminan kompetensi, dan yang terakhir adalah transformasi ekonomi ke arah ekonomi digital melalui penerapan SNI ISO 2700-1 2013 dan SNI ISO/IEC 20000-1 2018.

Bapak dan Ibu, Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati,

Demikian paparan kami. Kami mohon kiranya Bapak, Ibu Anggota dan Pimpinan Komisi VI DPR RI yang terhormat dapat mendukung program dan rencana kegiatan BSN pada tahun 2021.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om.

KETUA RAPAT:

Waalaikumussalam.

Selanjutnya kami persilahkan kepada wakil-wakil ketua dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bapak Guntur Syahputra Saragih. Sebelumnya saya sampaikan, Pimpinan Komisi menerima surat dari Pak Kodrat Wibowo, S.E.,PhD, selaku Ketua KPPU, yang hari ini ini tidak hadir di Rapat Dengar Pendapat karena ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan dengan Jaksa Agung Republik Indonesia. Demikian hal yang bisa kami sampaikan dan perlu saya tegaskan kembali untuk Anggota Komisi VI, kehadiran, berapa tadi ditanya virtual berapa kok, kamu kasih tau saya.

ANGGOTA:

Virtual banyak kok Mas. Kuorum, banyak.

KETUA RAPAT:

Sekretariat baru ini ya, kamu siapa. Siapa kamu, TA. TA-nya siapa?
18 Anggota, 18 Anggota.

Kami persilahkan kepada Bapak Wakil Ketua, Pak Guntur Syahputra Saragih.

WAKIL KETUA KPPU (GUNTUR SYAHPUTRA SARAGIH):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi dan Bapak Ibu Anggota Komisi VI.

Yang saya hormati Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Yang saya hormati Kepala Badan BP Batam.

Yang saya hormati Kepala Badan BPKS.

Ijinkan kami dari KPPU menyampaikan kinerja penganggaran di tahun 2020 dan rencana di 2021.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang saya hormati,

Dalam kesempatan ini, ijin kami menghaturkan ucapan Selamat Tahun Baru 2021, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan, Anggota Komisi VI DPR RI yang senantiasa memberikan dukungan untuk kemajuan KPPU.

Pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran tahun anggaran 2020.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati,

Pada periode RPJMN 2020-2024 tahun anggaran 2020, KPPU berperan dalam hal prioritas nasional, yang pertama yaitu ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dan program prioritas yang PP 5 yaitu penguatan kewirausahaan dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan koperasi, dan program prioritas ke-6 peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor *real* dan industrialisasi.

Realisasi anggaran tahun anggaran 2020 sebesar Rp113.294.248.713,- yaitu sebesar 99,33%, berikut komposisinya. Bisa ditampilkan, boleh lanjut. Untuk, *alhamdulillah* hampir semua direktorat dan biro, pencapaiannya di atas 95% sehingga total penyerapan anggaran di tahun 2020-99,33%. Dan dari hasil output, pencapaian output, beberapa kita di atas 100%. Hal ini dikarenakan juga, karena banyak juga, laporan dan kinerja dari tahun 2019.

Sebagai contoh untuk kemitraan 2019 kami memulai untuk penegakan hukum, dan 2020 sudah mulai banyak mendapatkan respon dari masyarakat, pencapaiannya di atas 100% dan beberapa hal lain seperti merger dan akuisisi sampai 98,5%. Hal ini terkait dengan semakin *aware*-nya pelaku usaha untuk melakukan notifikasi ke KPPU.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR yang kami hormati,

Sasaran strategis program kerja yang dilaksanakan KPPU pada tahun anggaran 2021 yaitu, yang pertama terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi pada program pengawasan persaingan usaha. Dan yang kedua terwujudnya tata kelola kelembagaan KPPU melalui *e-government* pada program dukungan manajemen. Kedua program tersebut merupakan turunan teknis dari amanat RPJMN 2020-2024.

Bapak Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi VI yang saya hormati,

Pada tanggal 2 Oktober 2020 KPPU menerima surat Menteri Keuangan Nomor 93/MK. 02/2020 tentang Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian Lembaga untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp118.485.015.000,- yang akan melaksanakan untuk alokasi anggaran, satu program pengawasan persaingan usaha sebesar Rp26.553.100.000,- program dukungan manajemen sebesar Rp22.843.718.000,- dan belanja operasional sebesar Rp69.088.197.000,-.

Sesuai dengan alokasi pagu tersebut, maka rencana kegiatan dan anggaran, bisa kami tampilkan dalam tabel 3 dan 4, boleh di, mungkin bisa kita lewati dulu mengingat waktu yang harus lebih efektif, berikut tabelnya.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang kami hormati,

Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa per tanggal 12 Januari 2021, mungkin sama dengan lembaga yang lain, kami menerima surat Menteri Keuangan Nomor S30/MK.02/2021 tentang *Refocusing* dan Realokasi belanja K/L Tahun Anggaran 2021, dengan penjelasan bahwa Pagu anggaran KPPU Tahun Anggaran 2021 mengalami, disebut di sini, penghematan sebesar Rp22.843.718.000,- sehingga untuk anggaran 2021 ada koreksi yang tadinya 118 miliar lebih, menjadi Rp95.641.297.000,- tepat sudah di bawah Rp100.000.000.000,-.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR yang saya hormati,

Tentunya berita, apa surat dari Kementerian Keuangan tersebut, kalau kami hitung terhadap pagu kegiatan, nilai penurunan Rp22.843.718.000,- tersebut terhadap kegiatan kami yang Rp49.309.800.000,- itu merupakan penurunan sebesar 46% dari kegiatan karena untuk belanja pegawai tentu tidak bisa kita kurangi.

Dari sini kami memang belum, seperti sebelumnya, kami belum menentukan yang mana yang harus dipotong untuk *refocusing* anggaran, Nanti dalam waktu dekat KPPU akan berkordinasi dengan Kementerian Keuangan. Namun, pada Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang saya hormati, tentunya pengurangan ini terhadap kegiatan sebesar 46% memang masih belum bisa kami tentukan yang mana yang harus kami kurangi karena memang sangat signifikan, untuk, apalagi untuk memenuhi target output yang sudah menjadi dalam RPJMN.

Dan tambahan lagi Bapak Pimpinan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, KPPU juga diberikan tambahan tugas untuk pengawasan kemitraan. Jadi memang, jika nanti RPP sudah menjadi PP, tentunya ini sudah harus menjadi tugas dari KPPU dengan tantangan seperti ini, pagu kegiatan kita turun 46% dengan tambahan tugas dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang UMKM masih tetap harus kami jalankan .

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang saya hormati,

Perlu kami berikan apa, garis bawahi bahwasanya dalam penanganan ke perkara KPPU tidak hanya perkara dari inisiatif, tetapi juga dari laporan. Dari berbagai output yang kami peroleh, itu sebagian besar dari laporan. Dengan anggaran yang tersisa sekitar 26 sekian miliar, kalau di tahun 2020 itu habis di bulan Juli. Sementara sesuai dengan peraturan, kami harus

merespon semua laporan dan laporan itu bisa terjadi dari bulan Januari sampai bulan Desember tentunya, dan itu harus kami respon.

Itu mungkin Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang saya hormati. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan, dan dengan penuh rasa hormat dan kami mengharapkan dukungan dari Komisi VI DPR RI agar KPPU senantiasa dapat mengemban amanah sesuai tuntutan undang-undang dan masyarakat. Selanjutnya sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan penyampaian paparan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Sekarang kepada yang terhormat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bapak Muhammad Rudi, sudah. Bapak Muhammad Rudi apakah sudah ada?

KEPALA BP BATAM (MUHAMMAD RUDI):

Siap.

KETUA RAPAT:

Pak Rudi.

KEPALA BP BATAM (MUHAMMAD RUDI):

Batam sudah siap.

KETUA RAPAT:

Saya pengen lihat wajahnya dulu jangan langsung ke paparannya.

KEPALA BP BATAM (MUHAMMAD RUDI):

Siap Pimpinan, kami hadir semua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Suaranya Pak Rudi belum belum belum jelas, mohon diperbaiki *mic*-nya.

KEPALA BP BATAM (MUHAMMAD RUDI):

Iya Pimpinan, kami coba.

KETUA RAPAT:

Sebentar-sebentar kita perbaiki dulu, di tempatnya Pak Rudi apakah suaranya sudah jelas.

KEPALA BP BATAM (MUHAMMAD RUDI):

Suara Pimpinan jelas sekali.

KETUA RAPAT:

Oh iya sebentar kita perbaiki dulu. Saya cek dulu untuk teman-teman yang hadir Pak Muhammad Toha keadaan sehat di Sukoharjo atau di Singapura atau di Amerika Pak?

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Siap, di Sukoharjo Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh di Sukoharjo.

Pak Sony bagaimana.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Nunggu dapilnya Ketua.

KETUA RAPAT:

Dimana? Bagaimana Pak Muhamad Toha gimana liputan di Sukoharjo tentang Covid-19?

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Semakin mengawatirkan dan menakutkan.

KETUA RAPAT:

Pak Doni Akbar?

F-PG (DONI AKBAR, S.E.):

Ya Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Soni, Pak Muahamad Rapsel mantunya Pak Ma'ruf Amin. Bagaimana Pak Muahamad Rudi? Apakah sudah jelas suaranya? *Hallo* Pak Rudi, bagaimana bisa? Sebentar, ke atas ya, keluar.

Oke, selanjutnya kami persilahkan lebih dulu Pak Iskandar Zulkarnain, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, apakah sudah ada di layar Zoom?

KEPALA BPKS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAIN):

Assalamualaikum, Pak.

KETUA RAPAT:

Oke, kami persilakan Pak Iskandar lebih dulu sebelum Pak Rudi yang mengalami gangguan teknis. Di mana Pak Iskandar posisi?

KEPALA BPKS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAIN):

Di Sabang.

KETUA RAPAT:

Bagaimana kondisi perkembangan situasi penularan?

KEPALA BPKS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAIN):

Ada dua Pak Ketua satu, untuk Covid, Alhamdulillah, Sabang aman-aman saja. yang kedua juga **(suara tidak jelas)** dari Komisi VI.

KETUA RAPAT:

Stafnya ada yang kena? Staf.

KEPALA BPKS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAIN):

Oh gak ada, gak ada. Alhamdulillah, tidak ada Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Gak, kantornya itu terbuka, ada, apa tertutup kacanya? Saya kira saya baru ngecek ini banyaknya karyawan kantor BUMN yang tertular karena memang tidak ada angin, kantornya Pak Iskandar apa udara AC semua itu terbuka Pak.

KEPALA BPKS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAIN):

Jadi begini Pak Ketua, kita tuh kira-kira dari dari tempat saya bicara ke bibir pantai tuh sekitar 150 meter, jadi pintu depan itu saya buka, pintu belakang saya buka, jadi *flow* udara yang masuk itu cukup, kan temperatur panasnya juga cukup di, kebetulan kita dekat pantai. Begitu saja Pak.

KETUA RAPAT:

Ruang Pak Iskandar itu terbuka, ada udara masuk nggak?

KEPALA BPKS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAIN) :

Ada. Jadi dipintunya dari dari bawah dari lantai satu ke atas itu, kita punya apa namanya kaya, punya ruangan, ada ada *void*, jadi udara tuh sirkulasinya bagus Pak.

KETUA RAPAT:

Ya ini kita lihat objektif dari penyebaran ini sebenarnya yang paling potensial apa sih, kan saya baru lihat-lihat ini, apakah akan tertutup kayak gini sangat lebih potensial terjadi penularan atau udara yang terbuka itu memperkecil.

Nah inilah perlunya nanti skenario vaksin itu kan yang lebih diprioritaskan. Saya pikir justru objektifnya dulu, penularan siapa dan kepentingan secara fungsional mereka-mereka yang divaksin seperti apa, ini yang saya pikir. Perlu dipikirkan bahwa kalau BUMN sektoral yang sangat strategis dalam *recovery* Covid ini menjadi suatu yang penting untuk diusulkan untuk lebih dulu divaksin, ini yang saya baru mikir-mikir untuk bicara sama Menteri BUMN.

Kami persilakan Pak Iskandar.

KEPALA BPKS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAIN):

Terima kasih, terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat para Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,

Kepala Badan Standarisasi Nasional,

Kepala Komisi Pengawasan Persaingan dan Usaha,

Kepala BP Batam.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya ngambil singkat saja Pak Ketua, waktunya juga sampai jam 12 kan, saya akan menyampaikan data realisasi anggaran tahun 2020.

Jadi Arah Kebijakan Kawasan Sabang yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan investasi, pemanfaatan dan optimalisasi aset serta meningkatkan sumber daya manusia, adalah:

1. Mengembangkan kemudahan berusaha di Kawasan Sabang;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana dukungan kemudahan usaha;
3. Mengembangkan diversifikasi dan intensifikasi pendapatan;
4. Mengembangkan diversifikasi pendanaan;
5. Mengembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia BPKS yang efektif, efisien dan berkualitas.

Bisa langsung saja Ibu atau Pak, di *slide* 6 saja Pak, realisasi anggaran, tahun anggaran 2020. Tahun 2020 BPKS mendapat pagu anggaran Rp110.143.715.000,-

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, dengan Pagu Anggaran Rp44.279.978.000,- kemudian Program Perencanaan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang, Pagu Anggaran sebesar Rp65.863.739.000,-.

Lanjut *slidenya*, lagi Pak. Jadi, jadi anggaran yang diberikan sekitar 110 miliar untuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, saya mampu menyelesaikan dana sebesar 65%, 65,12% total keseluruhan. Kemudian Dukungan Manajemen sebesar 81 81,76%, dana Perencanaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang sebesar 53,94%, lanjutkan Pak.

Dari data yang ditampilkan di atas, semua pekerjaan baik, masa depan kawasan dapat menyelesaikan 94,07%, pembangunan dan revitalisasi pelabuhan nasional Balohan sebesar 50, 50,97%. Ini ada isu di dalam menyelesaikan pekerjaan, ada dana yang masih bermasalah di wilayah tanah di dalam kawasan pelabuhan sehingga penggunaan dana itu tidak dapat digunakan 100%. Kemudian penyusunan pelabuhan penyeberangan Balohan 82,81%, persiapan pembuatan sertifikat tanah dan menyelesaikan 66,59%, itu untuk tahun 2020.

Kemudian lanjut, ini pelabuhan Pak yang tadi yang realisasi sebesar 50,6%, Balohan yang belum, yang sudah dikerjakan dan masih ada yang dikerjakan tahun (***suara tidak jelas***)

Lanjut Pak, ini kegiatan untuk pembagunan jalan simpang Balu-Lapeng. Penggunaan dana untuk Covid 2020, dari awal dari Rp2.013.781.000,- realisasi sekitar Rp1.860.891.270,-

Lanjut Pak Daswin. Pendapatan tahun 2020, banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Covid ya, untuk kapal *cruise* gak bisa masuk ke Sabang dikarenakan ada (***suara tidak jelas***)

Lanjut Pak Daswin, rencana kerja tahun, *slide* berikutnya, Rencana Kerja PPKS tahun 2021. Yang sudah disepakati dengan Komisi VI pada tahun 2020 Rp94.978.297.000.-, yang murni sebesar Rp51.001.489.000,-, kemudian untuk manajemen sebesar 40 miliar.

Penyelenggaraan perencanaan teknis, pembangunan sarana dan prasarana kawasan dan pengembangan teknologi, tata ruang dan lingkungan hidup sebesar Rp37.324.545.000,-.

Penyelenggaraan promosi, investasi, kerjasama dan pengembangan kawasan, dan kegiatan promosi dan investasi lainnya sebesar Rp16.935.762.000,- atau setara dengan 17,83%.

Dukungan manajemen sebesar Rp40.717.990.000,- atau setara dengan 42,87%.

Kegiatan di tahun 2021:

1. Peningkatan infrastruktur dan pengelolaan dan pengembangan Kawasan Sabang;
2. Peningkatkan dan optimalisasi pendapatan dari layanan perizinan, penataan aset, dan kepelabuhan;
3. Optimalisasi serapan anggaran TA 2021.

Dari dana yang disetujui sebesar 94 miliar pada beberapa **(suara tidak jelas)** untuk:

1. Membangun Pengembangan Kawasan, Pembanguna Rest Area, Pembangunan Lapangan Parkir Kawasan Iboih, Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Taman Wisata KM 0.

kemudian;

2. Pembangunan konektivitas jalan, pembangunan Jalan Simpang Balu dan seterusnya, pembangunan Jalan Blang Situngkoh.

Lanjut Mas. Mungkin lanjut Mas, lanjut, ini perencanaan kunjungan, lanjut. Jadi yang akan di, kapal yang akan datang ke Sabang di tahun 2020, ada dua yang jadi datang ke Sabang, Coral Geographer dan Sirena.

Demikian Pak Ketua, Bapak, Ibu sekalian, dari BPKS Sabang. Kemudian satu lagi, belum dimasukkan di dalam diskusi anggaran, ada permintaan dari **(suara terputus-putus)** tentang *refocusing* tahun anggaran 2021, sebesar 4,3% atau setara 4 miliar.

Demikian Bapak Ibu sekalian dari BPKS Sabang, kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaiikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya kami persilakan Pak Muhammad Rudi, apakah sudah bisa konek untuk virtual zoom-nya?

KEPALA BP BATAM (MUHAMMAD RUDI):

Sudah Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke. Kami persilakan Badan Pengawas Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

KEPALA BP BATAM (MUHAMMAD RUDI):

Ijin, Pimpinan.

Pagi hari ini BP Batam, saya didampingi oleh Pak Wakil Ketua, Deputi I, Deputi III dan Deputi IV.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumussalam.

KEPALA BP BATAM (MUHAMMAD RUDI):

Salam damai sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan.

Yang kami hormati Ketua dan Para Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Anggota Komisi VI DPR RI.

Yang kami hormati Kepala BSN, Ketua KPPU dan Kepala BPK Sabang, dan Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya bagi kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam kondisi sehat wal'afiat dalam acara Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BP Batam, Kepala BSN, Kepala KPPU, dan Kepala BPK Sabang untuk membahas tentang pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2020 serta rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2021.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua dukungan yang berkelanjutan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI terhadap semua proses anggaran dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Semoga dengan dukungan dari Bapak, Ibu sekalian kondisi ekonomi Batam ke depan akan lebih optimis dan lebih sukses dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Berkat dukungan dari Komisi VI dalam tahun 2020 BP Batam berhasil mencapai kemajuan dan pelaksanaan anggaran yang antara lain ditunjukkan oleh pencapaian kinerja penerimaan dan belanja yang lebih baik kondisinya dalam tahun 2019. Dalam tahun 2020, realisasi penerimaan mencapai Rp1.307,54 miliar atau 128,15% dari targetnya, sementara tahun 2019 mencapai Rp1.330,74 miliar atau 104,51% dari targetnya. Di sisi belanja realisasi di tahun 2020 mencapai Rp1.693,50 miliar atau 77,04% dari pagunya, yang berarti menunjukkan kondisi yang lebih baik dari realisasi di tahun 2019 yang mencapai Rp1.565,26 miliar atau 75,83% dari pagunya.

Secara per program rincian realisasi belanja BP Batam tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BP Batam sebesar Rp774,46 miliar atau 76,71% dari alokasi sebesar Rp1.009,56 miliar;
2. Program pengelolaan dan penyelenggaraan kawasan BP Batam sebesar Rp900.019,04 miliar atau 77,33% dari alokasinya sebesar 2.194 mohon maaf Rp2.198,10 miliar

Terkait dengan realisasi belanja BP Batam yang mencapai 77,04%, beberapa kegiatan yang belum selesai seluruhnya di tahun 2020 dan akan dilanjutkan di tahun baru 2021, antara lain adalah:

1. Beberapa proyek infrastruktur di bandara sekitar Rp92,13 miliar yang terdiri dari:
 - a. Pembangunan terminal kargo bandara, *multi years*, sebesar Rp73.67 miliar dikarenakan gagal lelang, akan dilanjutkan di tahun 2021 dan tahun 2022;
 - b. Revitalisasi Jaringan Listrik Terminal I, *multi years*, sebesar Rp18,46 miliar dikarenakan waktu pelaksanaan tidak mencukupi, sehingga baru bisa dilakukan pembayaran uang muka akan dilanjutkan tahun 2021.
2. Proyek *The Development of Sewerage System in Batam Island*, tidak terealisasi sebesar Rp56,13 miliar disebabkan adanya hambatan-hambatan, antara lain:
 - a. Resistensi masyarakat terhadap proyek yang masih baru, sehingga kesulitan mendapatkan akses ke perumahan. Masih diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat;
 - b. Kesulitan pengerjaan karena adanya instalasi utilitas lain di lokasi yang sama, antara lain, pipa air, kabel telepon, *fiber optic*, pipa gas; dan lain-lain.
 - c. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan kegiatan, faktor cuaca terutama curah hujan yang tinggi.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Dalam tahun 2021 fokus pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai telah kami sampaikan pada kesempatan RDP pada tahun lalu adalah pemulihan industri, pariwisata dan investasi. Fokus tersebut sejalan dengan salah satu fokus pembangunan nasional dan rencana kerja pemerintah tahun 2021.

Adapun strategi pengembangan kawasan khusus yang akan ditempuh BP Batam tahun 2021 yaitu:

1. Meningkatkan investasi swasta dalam sektor industry, jasa logistik dan pariwisata;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pendukung sektor prioritas;
3. Mengharmoniskan Pengaturan Pendukung Investasi;
4. Meningkatkan pelayanan dengan penyederhanaan regulasi dan birokrasi;
5. Meningkatkan pemanfaatan aset untuk menghasilkan PNBP yang optimal, dan
6. Menurunkan biaya logistik.

Dalam tahun 2021 DIPA BP Batam yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp2.014,20 miliar yang akan digunakan untuk mendanai dua program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp816,74 miliar atau 40,55%;
2. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp1.193,46 miliar atau 59,45%. Sumber dana dari pagu tersebut adalah :
 - 1) PNBP Batam, maaf, PNBP badan layanan umum sebesar Rp1.670,20 miliar atau 82,92%;
 - 2) Rupiah murni sebesar Rp287 miliar atau 14,25%;
 - 3) Pinjaman luar negeri sebesar empat koma (***suara terputus-putus***) miliar atau 5,23%, dan
 - 4) Rupiah murni (***suara tidak jelas***) pinjaman luar negeri sebesar Rp12 miliar atau 0,6%.

Terkait program pertama yaitu Program Dukungan Manajemen, kegiatan utamanya adalah kegiatan operasional seperti : kepegawaian, yaitu : gaji, tunjangan dan peningkatan SDM, pemeliharaan dan jasa.

Sementara itu, kegiatan-kegiatan dalam program kedua yaitu, Pengembangan Kawasan Strategis yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021 adalah

1. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan fasilitas Bandara Hang Nadim Rp309.000,96 miliar;
2. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Batam yaitu Rp30,4 miliar

3. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan fasilitas jalan dan *drainase* Rp139,14 miliar, dan
4. Peningkatan fasilitas wisata dan olahraga Rp30,28 miliar, dan
5. Pengembangan infrastruktur pengelolaan air dan kesehatan yaitu Rp176,85 miliar.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan anggaran belanja tahun 2021 BP Batam akan menempuh beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *refocusing* anggaran PNBPNP yaitu Rp66,35 miliar yaitu realokasi dari kegiatan yang kurang mendesak kepada kegiatan yang lebih mendesak, antara lain investasi di rumah sakit, pelabuhan, dan bandara;
2. Efisiensi anggaran dari belanja barang dan jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas, yaitu Rp2,76 miliar dialokasikan untuk belanja penanganan Covid-19;
3. Penggunaan saldo untuk pekerjaan infrastruktur yang mendesak yaitu Rp88,18 miliar yaitu antara lain pekerjaan penanganan banjir, perbaikan dan pelebaran jalan, ketersediaan air baku dan air bersih;
4. Peningkatan belanja modal untuk peningkatan pelayanan investasi dan PNBPNP;
5. Peningkatan kemudahan percepatan efisiensi dan kenyamanan pelayanan umum dan investasi.

Pimpinan Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Mengingat upaya Pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ke depan memerlukan dana yang tidak seluruhnya bisa dipenuhi oleh APBN maka dari tahun 2021 BP Batam akan mengusahakan dukungan dana non-APBN sesuai aturan berlaku. Skema yang kami kembangkan adalah memanfaatkan aset melalui pola kerjasama, seperti kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU, kerja sama operasional KSO, dan kerjasama penyediaan infrastruktur KSPI, khususnya terkait dengan pengembangan dan pengelolaan Bandara Hang Nadim, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan, pengembangan system pengelolaan air minum SPAM serta beberapa kegiatan lainnya.

Dengan pola kerjasama tersebut, kami berharap bahwa pembangunan di Batam dapat tercapai sesuai yang kita harapkan, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun kecepatan waktu (*suara terputus*) pelaksanaannya.

Pimpinan, Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Demikian lah hal-hal yang dapat kami sampaikan mengenai realisasi dan persiapan pelaksanaan anggaran pengembangan Batam.

Atas perhatian, bantuan, dan dukungan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang terhormat, kami ucapkan terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Walaikumssalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih kepada Kepala BSN, Wakil Ketua KPPU, Kepala BP Batam dan Kepala BPKS yang telah memaparkan, menyampaikan penjelasannya dalam keterbatasan komunikasi rapat kita. Kita tetap berusaha mencerna kaitan pelaksanaan anggaran tahun 2020 yang tentunya ini adalah sesuatu yang berkelanjutan dengan 2021 dalam kondisi *recovery* dampak Covid, ini nggak bisa tidak, semuanya langsung atau tidak langsung. Kita mengukur bagaimana politik anggaran kita, semaksimal mungkin mengarah pada terkait dengan PEN ini.

Ini adalah satu cara kita memanfaatkan *cost* rasionya dan *benefit* rasionya. Ini yang yang jangan sampai anggaran ini *muspro*, anggarani ini tidak berdampak terhadap hal yang penting dan *urgent* saat ini, walaupun tidak bisa semuanya karena hal-hal yang menyangkut rencana-rencana strategis yang tertunda. Itu pun masih sangat mungkin apabila memang itu, memang ada hal-hal yang sudah dilakukan terkait dengan persoalan dampak Covid.

Kami beri kesempatan kepada kawan-kawan Anggota Komisi VI yang hadir untuk memberikan tanggapan maupun masukan terhadap penjelasan yang telah disampaikan mitra kerja kita hari ini. Saya akan menyelesaikan pukul 12. Yang sudah mendaftar dulu, Ibu Nevi, Pak Andre dan Pak Herman Khaeron, di sini ada dua sebelah kanan. Kami persilahkan Pak Andre Rosiade.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Terima kasih Mas Bimo.

KETUA RAPAT:

Rosiade

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Terima kasih Mas Ario Bimo, Insya Allah kita doakan *resuffle* besok jadi Menteri, tulus ini doanya.

KETUA RAPAT:

Ngomong tu *kok yo ono wae* sayapnya gitu.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE) :

Kami pendukungnya Mas Bimo, Anggota Komisi VI yang paling siap jadi Menteri Pak Jokowi.

F-P. NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Maksudnya udah gak di pimpinan Pak Bimo lagi.

KETUA RAPAT:

Dia pengen jadi pimpinan, dia.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Pimpinan yang saya hormati.

Kakak Martin, lalu

Pimpinan KPPU, BP Batam, BP Sabang, Badan BSN yang saya hormati, Teman-teman Komisi VI.

Pertama-tama saya sudah mendengarkan paparan ya. Kita melihat bahwa teman-teman semua sudah bekerja maksimal ya, serapan anggaran sudah maksimal, ke depan tentu yang disampaikan oleh Pimpinan dari Mas Bimo, bagaimana anggaran itu jauh lebih efektif untuk mendukung program PEN yang sedang digalakkan oleh pemerintah, itu harapan kita. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya singkat saja. Sebagai Anggota Komisi VI DPR RI, saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kinerja dan keberanian KPPU. Saya orang yang selama ini mengkritik KPPU secara terbuka. Saya orang yang selama ini keras kepada KPPU secara terbuka, karena selama ini saya menganggap kinerja KPPU lambat dalam menghadapi dan memproses laporan kami. Tapi faktanya tanggal 15 Januari kemarin KPPU membuktikan dirinya sebagai lembaga negara yang punya nyali ya.

Jadi teman-teman sekalian saya ingin mengapresiasi bahwa ternyata KPPU adalah lembaga negara, komisi negara yang bernyali. Ya kita tahu urusan dengan perusahaan Cina banyak lembaga negara, kementerian negara begitu lemah dan tidak bernyali menghadapi yang dari Tiongkok, ternyata KPPU berani ya menunjukkan taringnya, menunjukkan tajinya. Untuk itu Mas Bimo, saya usulkan kepada pimpinan ya tahun anggaran 2021 dan ke depan, untuk biaya investigasi, biaya penyelidikan, apalagi kalau kita lihat paparan di buku tadi kan persentasenya jauh di atas capaiannya, target targetnya 250%, 600% menunjukkan bahwa KPPU serius bekerja.

Saya Andre Rosiade, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Komisi VI mendukung anggaran KPPU untuk ditingkatkan. Dan tahun depan Mas Bimo, saya usulkan undang-undangnya kalau bisa kita masukkan di Prolegnas tahun 2022, setelah selesai kita membahas Undang-Undang BUMN.

Itu saja. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi kepada KPPU, teman-teman KPPU punya nyali, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Anggaran punya nyalinya ini nanti kita tingkatkan Pak. Ini mahal lho, Pak Andre tuh jarang kasih apresiasi lho, ini ada apresiasi tentunya, apalagi sudah dijanjikan ada peningkatan anggaran untuk investigasi. Ke temen kontestasinya Andre Rosiade.

Ibu Nevi Zuairiana, kami silakan.

F-PKS (Hj. NEVI ZUARIANA):

Pak Pimpinan ada saja Pak, teman sejawat Pak, sama-sama satu Komisi Pak, teman sejawat Pak, bisa saja Bapak.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE) :

Biasa Mas Bimo begitu.

F-PKS (Hj. NEVI ZUARIANA):

Iya terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan, Anggota Dewan Komisi VI dan juga

Mitra Kerja yang telah hadir baik fisik, maupun virtual.

Khusus buat BP Sabang dan BP Batam, saya pikir sudah berulang kita bertemu dalam pertemuan tahun kemarin. Intinya juga masalah anggaran, dengan anggaran yang sedikit kita tuntutannya banyak, terutama seperti BP Sabang, bagaimana menjadi wilayah untuk menjadi tempat investor ya, karena juga sama dengan BP Batam daerah kawasan terluar di Indonesia tidak hanya sebagai tempat kunjungan, sebagai etalase Indonesia, tapi juga juga sebagai sarana untuk investor karena dekat dengan perbatasan luar negeri.

Untuk itu kepada BPKS dan BP Batam agar mengoptimalkan anggaran yang ada, dengan suasana Covid seperti ini tentu kita banyak *refocusing*, ya untuk tahun ini, mungkin kita *walahuallah* tahun depan, karena memang dengan adanya vaksin ini kita belum tahu kapan berakhirnya pandemi ini, sehingga walaupun keterbatasan, jadi istilahnya mungkin kita pakai bahasa ekonomi Pak Rudi dan dari BPKS Batam, sedikit-dikitnya modal kita punya anggaran punya kita miliki, sebesar-besarnya kita dapatkan. Ya tentu ini juga untuk balik kepada negara, sehingga ke depan dengan anggaran sedikit kita dapat hasil yang baik.

Khusus untuk BP Batam, ini sering dipertanyakan. Tadi juga sudah di dalam bahan, kapankah WTO gratis pemukiman di Batam bisa segera direalisasikan, karena memang masalah tanah ini sangat penting buat masyarakat. Kita berbeda dengan negara lain, kalau masyarakat Indonesia itu kalau sudah tinggal tidak punya sertifikat ya sehingga mungkin akan dievaluasi uang wajib tahunan otorita, ya itu harus gratis untuk di mungkin bisa berkembang ekonominya ke depan.

Lalu untuk BSN Pak ini sebetulnya banyak mungkin saya singkat saja. BSN kita ketahui bahwa di kondisi pandemi Covid-19 ini yang kita tahu belum tahu kapan berakhir, bagaimana program-program yang jalan itu tuh harusnya dengan menggunakan teknologi lagi Pak, ya artikan kondisi normal ini kan, kondisi tidak normal ini tidak tahu kapan terjadi. Jadi pertemuan virtual ini harus sering dioptimalkan untuk juga menghemat anggaran dan hasilnya juga maksimal, itu yang pertama Pak.

Lalu yang kedua adalah dengan adanya sertifikat halal untuk melindungi makanan minuman bagi umat Islam Indonesia. Kegiatan apa saja yang sudah akan dilaksanakan untuk BSN membantu agar sertifikasi yang tidak memberatkan UMKM. Ini saya sering dengar Pak BSN, tadi kalau saya lihat memang dari anggaran yang ada itu kan hanya sedikit gratisnya untuk pelaku UMKM, kalau kata mereka, pelaku UMKM, gimana kami mau punya merek-merek ada di produk kami, sedangkan biayanya memang mahal. Ya ini dipertimbangkan bagaimana cara membantu para pelaku UMKM untuk bisa jualan *online* dengan syarat merek dagangnya harus lengkap diprodukannya, jadi nggak, apa, nggak membantu Pak gitu, pelaku UMKM kita ini banyak sekali ya hampir 90% pelaku UMKM itu di Indonesia, itu untuk sertifikasi halal Pak.

Lalu Pak UMKM berkontribusi sebesar 60% terhadap PDB dan 14% terhadap *total ekspor* Indonesia. Mengingat banyaknya pelaku usaha UMKM terdampak pada pandemi Covid-19, mohon dijelaskan bagaimana strategi dan penguatan peran BSN dalam peningkatan kemampuan UMKM dalam menerapkan SNI, sehingga jadi *benchmark* mempermudah UMKM dalam menembus pasar ekspor, sama Pak ya, untuk perlindungan pada UMKM merek-merek dagang ini dimudahkan oleh BSN.

Untuk KPPU Pak, ya tadi sudah sampai mana Pak Andre memang kita anggarannya sedikit, mungkin orang bekerja di KPPU ini sepertinya orang sudah punya sosial aja ya. Mungkin kalau kerja di tempat lain pengacara-pengacara ini akan dapat uangnya banyak. Tapi lagi-lagi tadi Pak, kita harus menjadi wasit, ya jadi salah satu alasan, ini saya bacakan Pak ya, jadi salah satu alasan, salah satu alasan perusahaan melakukan *merger* dan akuisisi umumnya adalah untuk menjadi besar, dengan tempo lebih cepat secara anorganik yang bertujuan agar menjadi *market leader*.

Dengan adanya *trend* tersebut, bagaimana KPPU menjadi wasit kebijakan persaingan sehat serta dapat sinergikan antara pengusaha besar, menengah, dan kecil serta memberikan perlindungan bagi para pengusaha kecil dan rakyat kecil. Ya, nah ini perlu diperhatikan oleh KPPU agar menjadi wasit kebijakan persaingan, jangan nanti ada oligopoli-oligopoli lagi, monopoli lagi, ya ini kita nggak mau, ya KPPU harus menjadi wasit kebijakan.

Itu saja.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya kepada Mas Herman Khaeron kita permudah, Andrea ganggu kayak anak kecil, sudah sudah.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Sudah menang banyak, masih ganggu aja.

KETUA RAPAT:

Provokasi itu Pak.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Terima kasih Mas Bimo, ini datang lagi, ganggu lagi ini satu.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV yang terhormat.

Para narasumber mitra yang hari ini diundang hadir di sini dalam rangka Rapat Dengar Pendapat.

Pertama, saya tentu mengucapkan selamat tahun baru dan ini adalah persidangan awal di tahun 2021. Mudah-mudahan harapan ke depan bisa lebih baik untuk semuanya.

Yang kedua, tadi saya mencatat beberapa hal terkait dengan pemotongan anggaran atau *blocking* anggaran yang sudah diketok di tahun anggaran 2021. Namun di awal bulan ini terbit surat Menteri Keuangan untuk blokir anggaran dan KPPU tentu dengan tugas yang semakin bertambah pemotongan ataupun blokirnya 46%. Ini tentu juga akan membuat beban tersendiri ke depan sehingga apakah kerja akan lebih efektif atau tidak, termasuk untuk menginvestigasi terhadap berbagai kepentingan atau pun berbagai pengaduan dari pihak-pihak tertentu atas terjadinya monopoli dalam suatu perdagangan atau komoditas tertentu.

Menurut saya masih banyak pekerjaan rumah di KPPU yang tentu semakin turun anggaran akan semakin melemahkan terhadap implementasi program yang sudah disiapkan pada tahun 2021. Namun demikian khusus untuk KPPU, Mas Guntur, saya kira mengikuti beberapa *statement*-nya, semangatnya tinggi, kemudian keinginan untuk outputnya juga tinggi, tapi saya mohon penjelasan, tadi masih sumir sebetulnya, bagaimana memprediksi pada tahun 2021 atas blokir anggaran juga dengan target-target yang harus dicapai.

Padahal jika melihat situasinya, tentu juga agak sulit kalau *business as usual* gitu ya, sesuatu yang biasa-biasa saja dilakukan pada situasi yang tidak biasa, saat ini kan situasinya tidak biasa dan kalau kemudian bahwa semakin diperkecil anggaran juga apakah ini akan memberikan daya dukung terhadap target dan sasaran kinerja dari KPPU.

Yang kedua, menurut saya saatnya untuk juga merevisi terhadap Undang-Undang KPPU. Tadi tadi tidak disampaikan bahwa sesungguhnya banyak aspek yang jika kita ingin ke depan, tata peraturan di atau persaingan di usaha semakin baik. Semestinya regulasinya juga mendukung terhadap

berjalannya KPPU ini dan saya juga ingin mendengarkan lebih dalam tentu apa yang sesungguhnya menjadi kelemahan dari KPPU.

Yang ketiga, saya juga mendalami dari internal KPPU terkait dengan status kepegawaian. Status kepegawaian di KPPU ini juga sampai saat ini enggak jelas gitu, dan saya kira ini juga harus didudukkan pada proporsinya sebagai lembaga negara apakah masuk menjadi lembaga yang independen di luar ketatanegaraan, atautah menjadi pegawai negara, sehingga hanya komisionernya saja yang di luar sebagai pegawai negara, ini tiga aspek yang saya ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari KPPU.

Kemudian dari BSN, Pak Kukuh. Saya ingin melihat wajah Pak Kukuh sebentar, biar saya, ah iya ini betul, tadi kayak bukan Pak Kukuh soalnya, begitu dibuka ah betul Pak Kukuh, biar saya hafal Pak, karena saya termasuk baru di VI. Dulu pernah saya sampaikan pada rapat-rapat sebelumnya dengan BSN terkait dengan penajaman terhadap kinerja di BSN, termasuk bagaimana lebih menyentuh kepada sektor-sektor yang lebih potensial.

Artinya dulu saya meminta BSN untuk menjemput bola terhadap sektor-sektor potensial khususnya UMKM supaya memiliki standar nasional yang tentu ini akan menjadi garansi atau jaminan terhadap konsumen bahwa produk-produk yang sudah dihasilkannya tentu sudah berstandar nasional. Ini penting karena sampai saat ini banyak yang kemudian kita dorong kita *endorse* ya untuk UMKM, sektor-sektor UMKM, hasil-hasil produk dari UMKM meningkat kualitasnya, meningkat *value added*-nya tetapi pada sisi lain tidak mampu karena sulitnya untuk mereka mendapatkan sertifikasi nasional.

Nah saya ingin bahwa BSN menargetkan tahun 2021 misalkan kami akan mensertifikasi 1000 UMKM, ini ada enggak dalam programnya. Nah kalau kemudian bahwa target-target ini lebih kuantitatif disampaikan pada setiap tahun berjalan. Berarti kan dalam 5 tahun ada 5000 misalkan, yang ini khusus untuk UMKM, untuk sektor-sektor usaha yang potensial menyentuh apa namanya kepentingan rakyat kecil, menyentuh usaha kecil menengah, tetapi mereka pasif, pasif untuk mengurus terhadap sertifikasi.

Nah ini dijemput bola oleh BSN sehingga tentu ini akan menjadi situasi baru, kami di DPR siap untuk membantu, untuk mengawal, untuk membantu dan mengawal gitu. Jadi jangan kemudian, waduh ini butuh biayanya mahal nih kalau jemput ke daerah, berbagai daerah, kami bantu di dapil masing-masing, Pak Ario Bimo akan mengeluarkan biaya di daerahnya untuk menjemput UMKM-UMKM yang akan disertifikasi gitu, dan saya juga siap dari dapil saya untuk menyodorkan daftar, ini Pak, Pak Kukuh daftar UMKM yang bisa disertifikasi, karena mereka akan *go to modern market, go to international market* misalkan. Karena kalau tidak ada jaminan menurut saya ini agak sulit dan BSN menurut saya juga harus mencakup keseluruhan.

KETUA RAPAT:

Pak Herman.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Mohon penjelasan, itu yang dimaksud usulan Pak Herman sertifikasi wajib atau sertifikasi wajib atau sertifikasi untuk mendapatkan.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Iya pokoknya SNI Pak, seperti orang pakai helm harus SNI, kalau nggak SNI mereka tidak memenuhi standar nasional gitu. Nah ketika SNI itu diterapkan kepada satu UMKM berarti mereka sudah menerapkan *good processing practices* misalkan.

KETUA RAPAT:

Tapi biar *clear* Pak.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Gitu ya Pak ya.

KETUA RAPAT:

Pak Herman mau tanya, kalau satu disertifikasi apakah produk sejenis juga harus semua.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Oh ya kan sertifikasi itu kan kepada produk perusahaan tertentu.

KETUA RAPAT:

Gak yang UKM tadi lho?

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Yang apa?

KETUA RAPAT:

Usulan Pak Herman misalnya palu ini disertifikasi standar, seluruh palu atau hanya hanya palu perusahaan tertentu.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Hanya palu perusahaan tertentu karena yang disertifikasi bukan palunya Pak, yang disertifikasi ada perusahaan itu, apa yang menghasilkan

itu. Dan kalau perusahaan-perusahaan lain juga mengikuti prosedur atau *good processing practices* yang kemudian ini menjadi standar penilaian SNI sehingga mendapatkan label SNI, ya tentu diperbolehkan gitu, kepada yang lain. Ya kalau ini ada menurut saya inilah era baru UMKM dia akan mendapatkan *value added* gitu ya, dengan produk yang sama tetapi harganya akan lebih meningkat, dan ini bisa menjadi garansi pada konsumen di semua level dan tingkatan.

Ini menurut saya yang saya inginkan, karena sejak awal kok tidak ada target. Tadi disampaikan ada uang, ada berapa program, tapi tidak ada target secara kuantitatif yang ingin dicapai sejalan Pak, ini sejalan dengan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah, Pak Teten mengeluarkan program untuk membina UMKM. Kalau tidak ada stimulusnya kan tidak tidak menjadi lomba-lomba kebaikan gitu.

Nah, kalau misalkan siapa yang bisa menjalankan usaha atau pun stimulus anggaran yang dari UMKM bisa dijalankan dengan baik, menghasilkan produk yang sesuai dengan standar SNI yang sudah ditetapkan, maka *value added*-nya tidak ada. Tapi kalau kemudian dijanjikan akan mendapatkan SNI maka mereka akan berlomba-lomba menghasilkan produk yang lebih baik dan pada waktunya kalau mendapatkan SNI tentu ada *value added* di situ.

Kemudian kepada BP Batam dan BP Batam selamat kepada Pak Muhammad Rudi untuk melanjutkan sebagai Kepala BP Batam, karena terpilih kembali menjadi Walikota Batam. Jadi syaratnya jadi Kepala BP Batam itu harus menjadi Walikota Batam sehingga atas terpilihnya Pak Rudi tentu selamat untuk melanjutkan sebagai Kepala BP Batam. Dan Pak Iskandar Zulkarnain sebagai etalase dan menurut saya magnet untuk menghadirkan para investor di kawasan-kawasan bebas semestinya Batam dan Sabang ini menjadi potret investasi nasional, adanya LPI apakah masuk lebih deras ke BP Batam ke BPK Sabang tentu ini akan menjadi ukuran kinerja dari BP Batam maupun BPK Sabang.

Oleh karenanya, menurut saya ya prestasinya jangan seperti ini harusnya ada sesuatu yang baru Pak Rudi ya, Pak Rudi, Pak Zulkarnain, ada sesuatu yang baru menjadi daya tarik pada situasi-situasi tidak normal seperti ini, apalagi dengan adanya dorongan besar dari pemerintah pusat dengan membangun LPI.

Nah, kalau adanya LPI mudah-mudahan nanti apa ya di sini ya, Pak Bimo di sini, LPI ya, Lembaga Pembiayaan Investasi di sini? Nah kalau misalkan di sini tentu nanti bisa dipaduserasikan. Nah, oleh karenanya harus juga masuk dalam *road map* tahun 2021 terkait dengan pengembangan kawasan BP Batam dan BPK Sabang. Nah kalau ini dimasukkan bagian daripada prospektif untuk bisa menampung investasi yang nanti akan dikembangkan di LPI tentu ini menjadi suasana yang baru menjadi *targeting* yang baru di BP Batam maupun di BPK Sabang. Oleh karenanya, mohon saya kira ada sesuatu yang lebih inovatif agresif karena BP Batam yang dulu pertumbuhannya 14%, kemudian menjadi rata-rata hanya 2%, naik lagi menjadi 4 sampai 5%, sekarang mungkin terdistorsi lagi, turun lagi gitu. Saya mohon juga nanti seperti apa sih fluktuasi peningkatan dan penurunannya, dan kemudian hal-hal apa yang bisa mengintervensi atau menjadi stimulus

sehingga BP Batam bisa kembali seperti kejayaannya dulu. Dulu kan dianggap bahwa kehadiran Badan Otorita Batam menjadi penghambat, menjadi dualisme, bahkan tugalisme, dengan adanya kepentingan Kota Batam Badan Otorita, Otorita Batam dan Provinsi Kepulauan Riau, dulu menjadi tumpang tindih.

Tapi dengan kemudian diberikan kewenangan kepada Pak Rudi sebagai walikota yang kemudian bisa memanduserasikan secara kebijakan, baik demi kepentingan Kota Batam maupun demi kepentingan BP Batam, semestinya ada sesuatu yang lebih agresif, lebih inovatif dan menghasilkan pertumbuhan yang lebih daripada dulu yang beralasan karena terjadinya dualisme maupun tugalisme terhadap kebijakan di Batam.

Saya kira demikian. Terima kasih Pak Bimo, mohon maaf waktunya agak panjang dan saya kira ini pertemuan pertama dan saya curahkan semuanya pikiran ini demi kebaikan bangsa dan negara. Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Daftar Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya itu bagus tuh Pak. Nanti rapat-rapat berikutnya paparkan ke kita ide untuk memberikan dukungan supaya di era globalisasi dan *retreat agreement* ini, UMKM mendapatkan satu pengakuan sebagai produk yang standar internasional lewat SNI. Nah dukungan-dukungan anggaran yang khusus UMKM, saya kira perlu dipisahkan nanti ke depan, mungkin ada di Kementerian Koperasi atau pengajuan dari BSN sendiri. Ini penting karena UMKM ini tanpa ada satu kehadiran negara untuk memperkuat daya saing, baik untuk konsumsi lokal, nasional, dan global saya kira cukup berat, ini penting.

Selanjutnya kami persilakan yang masih terdaftar Pak Tommy Kurniawan, ada lagi nggak? Oh Habib.

F-PDIP (DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Saya daftar pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya saya perpanjang sampai 12:30 kawan-kawan mohon tertib, waktunya pendek, tadi perpanjangan ke Pak Herman karena yang daftar cuma 4, tapi sekarang tambah 4, mohon kita tertibkan 2 menit.

Kami persilakan Toni Kurniawan dan selanjutnya ada Pak Habib, ada Pak Martin ada Pak Yevri Sitorus.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.) :

Daftar Pak Pimpinan.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan Komisi VI yang saya hormati.

KETUA RAPAT:

Pak Hendrik, Selamat Natal. Pak Hendrik, Pak. Saya sapa dulu, saya dapat paket Natal Pak, belum terima kasih Pak. Selamat Natal Pak.

Pak Tommy, kami silakan.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati dan juga rekan-rekan Komisi VI.

Kepala BSN yang saya hormati beserta seluruh jajaran.

Wakil Ketua KPPU yang saya hormati beserta seluruh jajaran.

Kepala BP Batam dan juga Kepala BPK Sabang yang saya hormati.

Karena waktunya tidak panjang saya kerucutkan saja. Saya akan sedikit bertanya kepada BSN. Benar tadi apa yang dikatakan oleh Pak Herman Khaeron mengenai *value added* ketika satu barang UMKM itu sudah distandarisasi atau sudah SNI. Itu sangat berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen Pak. Jadi saya kira BSN ini ke depan harus semakin kuat dalam menjadi apa namanya perisai bagi produk-produk UMKM yang harus memenuhi sebuah standar nasional karena kalau tidak bisa standar itu pasti kepercayaan konsumen juga akan berkurang.

Nah kemudian karena peran BSN ini sangat penting dalam standarisasi produk di Indonesia, terutama kita fokus kepada UMKM. Kalau saya lihat dari anggaran tadi yang dijelaskan atau dipaparkan, saya tidak melihat ada anggaran untuk sosialisasi mengenai standar-standar barang-barang yang harus distandarisasi, kebanyakan kan pelatihan-pelatihan. Nah, ini apa penyebabnya? Saya kira bagi usaha-usaha baru atau UMKM-UMKM baru ini masih mungkin banyak yang belum mengetahui informasi mengenai standar yang harus dilakukan oleh mereka. Ini saya kira penting, kalau di sini saya lihat ada anggaran humas dari 7 miliar dipotong menjadi 4 miliar. Nah, ini mohon dijelaskan untuk apa aja.

Kemudian tadi dalam capaian output BSN 2020 Pak, ada 4 penelitian standarisasi yang Bapak tidak jelaskan secara detail. Kami mohon dijelaskan

penelitian tentang apa aja. Kemudian berikutnya mengenai standarisasi dan mekanisme produk halal dari BSN.

Kalau nggak salah sekarang itu sudah, sudah, sudah apa namanya, ada standar halal. Nah, itu seperti apa sih Pak penjelasan, agar ini bisa saya jelaskan juga kepada UMKM yang ada di dapil saya. Nah, kemudian ini kan ada data terbaru bahwa impor apa namanya sepeda itu tinggi sekali Pak. Nah makanya apakah sudah memenuhi standar atau sudah di SNI kan atau belum itu Pak? Bukan nanti kalau nggak sesuai SNI gimana *bro* tiba-tiba patah, karena ada *frame-frame* yang masuk itu mungkin yang kalau yang mahal harganya itu pasti memenuhi standarlah ya, standarisasi internasional tapi kan ada *frame-frame* yang masuk dengan kualitas yang nanti kan akhirnya juga nggak bagus. Saya kira mohon penjelasannya.

Terima kasih.

Itu saja.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Saya selesaikan dulu sebelah kanan senior kita. Kami persilakan Bapak Subardi S.H., M.Hum.

F-P.NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Baik.

Langsung.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang.

KETUA RAPAT:

Mohon waktu dipersingkat.

F-P.NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Siap.

Yang pertama saya ingin menanyakan kepada KPPU yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Herman dan sebagainya. Nah, saya melihat di sini sebagaimana KPPU itu dalam rangka untuk upaya menciptakan sebuah usaha yang, usaha yang apa sehat dan tentunya ini karena kita di Indonesia ini cukup banyak ya, berkembang, UMKM berkembang menengah berkembang, perusahaan-perusahaan swasta tentunya ada satu indikatorlah untuk bisa menyelesaikan, apa menciptakan sebuah usaha yang yang sehat tersebut. Namun demikian, saya melihat daripada paparan yang disampaikan

ini, dalam apa, *text* ini, tidak ada sebuah program atau upaya melakukan sosialisasi ya terhadap jenis-jenis usaha tertentu atau secara global, agar mereka tahu bahwa adanya KPPU.

Jadi peran KPPU apa, sehingga ketika mereka itu melakukan pelanggaran-pelanggaran bisnisnya, dah tahu dia melanggar hukum, tahu melanggar etika bisnis dan sebagainya dan sebagainya, bukan ketika dia melangkah tidak tahu ketika ternyata mereka baru terkena sanksi ataupun ditindak. Bahkan sebaliknya, ketika seseorang yang sudah tahu menggunakan trik-trik tertentu di dalam melemahkan lawan dengan berlindung di KPPU. Ini mohon ada sosialisasi, tentunya anggaran yang sekian ini nggak memadai untuk sosialisasi, tapi alangkah baiknya kalau menciptakan yang lebih bagus adalah adanya sosialisasi, itu yang pertama ya.

Kemudian berikutnya dari ini Pak Rudi ya. Selamat datang Pak Rudi, BP Batam kondisi seperti yang disampaikan Pak Herman dulu saya bangga dengan Batam, ketika Batam tuh, kita ke Batam tuh rasanya ke luarlah. Nah, dengan adanya Covid seperti ini sejauh mana upaya-upaya di dalam rangka menciptakan satu investasi ya yang ada? Apalagi apa namanya Otoritas Batam juga seorang Walikota, Walikota juga apa namanya sebagai sebagai Kepala Otoritas Batam. Nah, hal ini tentunya akan ada birokrasi yang terpotong di dalam investasi. Nah, oleh karena itu, sejauh mana langkah yang dilakukan dalam rangka Covid ini sampai nanti Covid-nya selesai sehingga bisa mengejar ketertinggalan selama Covid ini, ini sederhana itu aja Pak Rudi ya.

Kemudian yang ketiga itu BSN ya. Nah BSN ini sama itu prinsipnya sama dengan yang tadi saya sampaikan KPPU. Masyarakat usaha kita tuh berkembang luar biasa, apalagi UMKM, gencarnya UMKM dari beberapa lini ya, operasi macam-macam instansi melakukan upaya meningkatkan UMKM tetapi tidak diikuti sebuah standartsisasi, sehingga persaingan yang kurang sehat dengan me memainkan harga, dengan memainkan kualitas, sehingga ini justru merugikan kita. Peran BSN sejauh mana di dalam melindungi kualitas kita, sehingga kita mampu bersaing terhadap barang-barang yang dari luar khususnya Cina. Cina bisa memberikan harga yang sangat murah, kita bisa, tentunya kita bisa juga memberikan harga yang lebih murah, karena bahan-bahan produksi atau pun apa alat produksi maupun bahan-bahan produk dari bahan baku dari produk itu dari dari kita cukup luar biasa. Nah peran BSN seperti apa dalam rangka memberikan apa namanya penguatan terhadap UMKM yang ada ini.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kami persilakan ke Habib Abdul Hakim Bafagih, kami persilakan.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Inggih, matur suwun, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan juga Anggota Komisi VI yang ganteng dan cantik-cantik, yang berbahagia dan juga;

Ketua KPPU, Kepala BSN dan juga tadi ada BP Batam dan BP Sabang.

Salam kenal semua saya juga termasuk baru Pak di Komisi VI, saya pertama ke KPPU Pak *sinten*.

WAKIL KETUA KPPU (GUNTUR SYAHPUTRA SARAGIH):

Guntur Pak.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Pak Guntur *nggih*, Pak Guntur pertama selamat atas apa gugatannya Mas Andre, Bang Andre kemarin, berhasil. Cuma yang ingin saya tanyakan Pak karena waktunya singkat, sebenarnya seberapa kuat *power*-nya KPPU ketika berhadapan dengan perusahaan-perusahaan multinasional raksasa, terutama khususnya dari Tiongkok, yang memang *back up* finansialnya lebih kuat? Karena kalau kita melihat kemarin, semen yang di Kalimantan itu ya beruntungnya ada Bang Andre yang pasang badan di situ.

Lah kalau kejadiannya nggak ada yang pasang badan atau enggak ada yang getol menyuarkan itu seperti bagaimana? Belum lagi seperti salah satu aplikasi yang memang sering kita gunakan, aplikasi *online*, untuk antar jemput atau pun pesan makan itu. Itu kan juga kalau kita melihat, ya tinggal dua pemain saja, tinggal dua pemain saja dan ada wacana mau *merger*. Nah ini kan jadi tantangan tersendiri untuk KPPU akhirnya yang lain tidak bisa, tidak bisa ikut bersaing ataupun bagaimana.

Sedangkan kalau kita melihat dari dua, dua raksasa ini, itu duitnya nggak kembali ke Indonesia lho sebenarnya Pak, karena kan mayoritas daripada investornya juga bukan dari Indonesia. Belum lagi nanti ketika ekosistemnya jadi Pak, itu orang semakin ketergantungan kalau semakin ketergantungan, kalau ekosistem itu dimanfaatkan dengan baik itu bagus, tapi kalau nggak, istilahnya orang Jawa itu *naleni* Pak, apa bikin ketergantungan akhirnya nggak bisa, nggak bisa beralih, contoh nanti dari mitranya dari *driver*-nya ditekan sedemikian rupa. Kemudian dari kios-kiosnya dinaikkan *profit sharing*-nya, kan akhirnya kacau kan iklimnya seperti itu, itu untuk KPPU.

Kemudian untuk BSN yang kedua, tadi kalau saya berbicara UMKM udah banyak yang menyampaikan Pak Pak Gigih ya.

KEPALA BSN (KUKUH S. ACHMAD):

Kukuh Pak.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Pak Kukuh, *nggih*, Pak Kukuh. Nah, itu saya menyarankan Pak, tempatnya *panjenengan* itu berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Pak, karena mereka yang punya datanya terkait sektor-sektor industri kreatif yang memang lebih-lebih *aware* terhadap UMKM. Kenapa saya tidak menyarankan ke Kementerian Koperasi UMKM? Saya lebih optimis dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatifnya, seperti itu. Dan memang kemarin di Komisi X ada Panja Penguatan Ekonomi Kreatif, jadi biar bisa bersaing dengan industri-industri yang udah besar, karena kalau kita berbicara standar ini, sebenarnya enggak cuma SNI aja Pak ya, ada beberapa ISO itu, mungkin kalau yang, kalau yang mau ekspor terkendala mungkin enggak ada ISO 9001, 14001-nya, nah itu *treatment*-nya gimana, biar mereka enggak enggak kirim barang ke makelar-makelar seperti itu Pak.

Kemudian yang kedua, dalam paparan yang disampaikan BSN terjadi pemangkasan alokasi anggaran untuk standarisasi agro, kimia, kesehatan, dan halal, padahal sektor tersebut adalah sektor yang sedang dibutuhkan dalam situasi krisis ini, dan sebagai amanat Undang-Undang Ciptaker di mana akan dibentuk Badan Penjamin Produk Halal. Tadi sudah disampaikan sama *Bro Tomi*, setahu kami BSN juga akan dilibatkan dalam memberikan standarisasi produk halal, apa dasar pemangkasan tersebut selain memenuhi instruksi Surat Edaran Menteri Keuangan, itu yang kedua.

Kemudian yang terakhir, yang ketiga Pak. Saya ingin tahu kalau BSN dengan BPOM itu komunikasi, koordinasinya, dan bincang-bincangnya seperti bagaimana Pak ya? Karena ada beberapa industri-industri itu yang memang dia harus ada SNI-nya, harus ada ijin BPOM-nya. Kadang-kadang SNI keluar BPOM belum keluar, BPOM udah keluar SNI belum keluar, lama-lama *mumet dewe* enggak jadi usaha. Nah itu saya *pengin* tahu sejauh mana koordinasinya.

Kemudian untuk BP Sabang dan Batam. Nanti saya mohon dikoreksi Bapak-bapak yang ada di virtual. Kalau melihat dari pendapatan khususnya dari BP Sabang ini kan targetnya 4 miliar, yang *achieve* 1,3. Kemudian di BP Batam juga ada penerimaan-penerimaan lain. Cuma yang saya belum lihat itu, ini kan dibentuk badan pengelola, badan apa, kawasan kawasan perdagangan ini kan tujuannya untuk meningkatkan ekonomi, untuk mengembangkan daerah tersebut.

Di kedua paparan ini saya belum melihat secara khusus kenaikan-kenaikan dampak ekonominya, kemudian pengembangan wilayahnya. Padahal menurut kami itu salah satu indikator yang harus diperhatikan, contoh seperti di Sabang dia enggak bisa *achieve* 4 miliar, tapi bisa menggerakkan ekonomi, daerahnya berkembang, itu udah cukup baik, tapi di sini tidak ada, dan juga untuk BP Batam pertanyaan yang sama. Jadi indikator terkait perkembangan ekonomi di daerahnya. Kemudian sejauh mana daerah itu berkembang.

Mungkin itu saja Pimpinan yang dapat saya sampaikan kepada KPPU, kemudian BSN, dan juga BP Sabang dan BP Batam yang hadir secara virtual.

Terima kasih atas kesempatan.

Assalamu'alaikum.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam.

Masih ada Pak Deddy Sitorus, Pak Muhammad Toha dan Pak Martin.

Kami persilakan Pak Deddy Sitorus.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera buat kita semua.

Om Swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Pimpinan yang pertama saya mau bertanya kepada KPPU, ini masih pertanyaan seperti yang sebelum-sebelumnya. Yang pertama Pak, sebenarnya apa filosofi dasar dari KPPU ini? Apakah untuk meningkatkan apa namanya kemampuan kompetisi dari dari apa namanya, dari industri kita? Atau untuk melindungi industri kita juga? Atau apa sebenarnya? Karena saya melihat kan begini Pak, kita ini melihat kalau saya melihat harusnya UMKM ke bawah itu dia mandatory tetapi sebagai hak, tapi kalau dia sudah menengah ke atas dia menjadi mandatory kewajiban.

Jadi negara justru harus membantu UMKM ini supaya mampu memenuhi standar yang ditetapkan gitu, jadi dibalik gitu logikanya, kalau menurut saya. Jadi harus ada *cross subsidi* gitu. Jadi biaya yang ditetapkan kepada kepada industri menengah besar dan kemudian impor itu juga mampu mensubsidi UMKM kita Pak supaya mereka mandatory apa namanya hak gitu, untuk mampu bersaing gitu. Juga tadi apakah memang ini juga salah satu cara kita untuk melindungi masyarakat dan juga menekan impor daripada daripada , *sorry* BSN bukan KPPU, maaf salah tadi, BSN ya, ini bagaimana sebenarnya yang kita mau *achieve* gitu kira-kira. Nah saya juga, itu yang pertama.

Yang kedua, soal masih banyaknya kementerian atau lembaga lainnya mensyaratkan standar-standar tertentu. Ini bagaimana sinerginya Pak? Bagaimana anda dengan PLN, dengan Pertamina, dengan ESDM, dengan Kementerian Kesehatan? Nanti kalau sudah ada SNI, masih ada lagi standarisasi. Kalau BPOM okelah, obat segala macam menyangkut manusia, itu kan uji klinis, tetapi yang menyangkut alkes misalnya di Kementreian Kesehatan. Ambil contoh saya khawatir nanti dalam rangka vaksinasi ini kita

membeli *cooler box* saja itu impor Pak, padahal usaha plastik dan industri rumah tangga kita mampu *menyediakan cooler box* untuk vaksin misalnya. Nah ini bagaimana Pak, bagaimana sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait yang juga mengeluarkan sertifikasi ya, ini ini saya butuh penjelasan juga.

Yang ketiga, memang tentu dengan pemangkasan anggaran kita tidak bisa *bussines as usual*. Oleh karena itu, saya bertanya apa sih mau di-*achieve* setahun ini dengan keterbatasan biaya dan sumber daya yang ada pada BSN. Ini saya ingin tahu karena kita kan tidak cukup mengeluh dengan anggaran yang dipangkas, tetapi bagaimana dengan apa yang ada, karena situasinya pandemi global. Bagaimana kita fokus pada hal-hal prioritas yang bisa di-*achieve* dengan itu, dengan dana yang tersedia pada kita, terobosan apa yang kita punya supaya mampu memenuhi apa yang menjadi tujuan maupun filosofi, visi dari pada BSN itu. Itu buat BSN.

Buat KPPU saya ingin menyampaikan begini Pak. Jadi saya khawatir dengan sekarang tender-tender terutama dikonstruksi Pak, karena itu saya tahu banyak yang banting-bantingan harga sampai gak karu-karuan Pak, sampai 68% dari *owner estimate* atau HPS ya. Itu bagaimana dengan apa namanya, dengan kualitas daripada pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu. Saya cukup apa namanya, *worry* dengan kemarin misalnya kejadian di Sultra itu Kantor Gubernurnya ambruk seperti kerupuk, gedung di sebelahnya aman.

Kalau gedung seluruhnya yang ada di area itu semua ambruk, saya bisa terima bahwa guncangan gempanya sangat dahsyat, tapi ini kantor Gubernurnya tok yang seperti kerupuk, kiri kanannya gedungnya masih berdiri, berarti kan ada yang salah di situ Pak. Nah saya kira KPPU juga harus apa namanya, memberikan pikiran atau rekomendasi atau katakanlah investigasi, terhadap lelang-lelang penting yang terkait dengan infrastruktur yang menyangkut kehidupan banyak orang, seperti jembatan dan gedung Pak, karena saya khawatir Pak betul-betul sekarang ini lelang kita itu sudah benar-benar jadi predator semua. Kalau ada yang nawar 72 itu udah hebat itu Pak karena masih ada yang berani di 65 atau 68%. Nah, ini kan berbahaya buat kita semua perlu menjadi pemikiran.

Yang terakhir untuk kawasan Sabang. Saya kira, Pak saya kira kalau ekosistem industri dan perdagangan di Aceh tidak bisa kita perbaiki sejalan dengan pengembangan kawasan itu. Saya kira hampir mustahil akan memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat Aceh apalagi untuk Indonesia Pak, karena kalau di Sabang tidak ada apa namanya, industri maupun geliat perdagangan yang kuat Pak, termasuk perkapalan dan sebagainya. Akan sangat aneh kalau orang mau datang ke Sabang berdagang pulang kapalnya kosong Pak.

Jadi saya kira ini tentu harus menjadi bagian yang integral dari pembangunan Aceh secara keseluruhan. Sepanjang itu tidak terjadi saya kira Pelabuhan Bebas Sabang hanya akan menjadi tempat yang ya begitu-begitu saja Pak. Jadi saya kira badan atau namanya pengembangan kawasan Sabang ini harus segera berdiskusi dengan Bappenas dengan Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Ekuin untuk melihat *grand picture* dari pengembangan Aceh, tidak cukup hanya bicara pengembangan kawasan Sabang. Bayangkan orang kapal kosong bawa barang, kapal berisi bawa

barang ke Sabang terus mereka pulang kapal kosong, wah ga ada, mahal barangnya jadinya Pak. Nah ini kan yang harus dipikirkan juga Pak, supaya ada *take in* dan *in take* dan apa namanya, keluarnya ada.

Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Deddy Sitorus.

Selanjutnya kami persilahkan Pak Muhammad Toha.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI,

Yang saya hormati.

KETUA RAPAT:

Pak Toha.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Ya halo?

KETUA RAPAT:

Itu gitarnya sudah SNI belum, buanyak banget di belakang tuh.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Udah Pak, kita bayar pajak Pak.

Jajaran BPKS Sabang, BP Batam, BSN dan KPPU yang saya hormati,

Yang pertama saya sampaikan pertanyaan kepada BSN. Kemarin vaksin itu menurut MUI halal dan suci ya, kemudian menurut BPOM boleh digunakan karena kedaruratan. BSN di sini kapasitasnya apa? Ikut apa enggak dalam menentukan kemurniaan, kesucian, kehalalan sama kedaruratan itu? Kemudian ya fungsinya di mana? Lalu terkait SNI yang menangani apa Covid ada 30-an itu apa saja, tadi belum disebutkan, 30-an yang di SNI kan itu. Lalu ketika saya beli sepeda itu Pak, beli sepeda itu ada SNI-nya, semua sekarang mulai Januari 2020 atau 2021 itu. Nah itu bayarnya berapa, anunya berapa Pak, misalkan produsen importir atau apa namanya, barang-barang yang dari luar negeri, kemudian itu yang menarik kontribusi atau pajaknya, atau PPN, atau PPH-nya, pembayaran supaya SNI itu apa,

kemudian masuk kemana. Lalu di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ada izin usaha, kemudian izin edar, kemudian sertifikat halal ya.

Nah disertifikat halal itu kan rencananya akan didirikan badan atau ya badan cabang-cabang, badan sertifikasi daerah. BSN di mana ininya, keikutsertaanya, partisipasinya di mana, BSN untuk mensertifikasi semua barang atau produk yang ada di daerah-daerah, perencanaan itu, ada rencana di sana apa enggak?

Kemudian Otorita Batam atau BP Batam. Tadi sudah disampaikan beberapa kendala proyek-proyek itu akan tetapi saya akan tetap menanyakan lagi, sampai di mana, apa progresnya rehab Dermaga Batu Ampar, *dragging* alur dan kolam pelayaran, dan dermaga utara Pelabuhan Batu Ampar, pembangunan kontainer yacht 5, yang 5 hektar itu, kemudian pengelolaan air limbahnya, lalu rehab jaringan listrik terminal 1 Bandara Hang Nadim, dan pembangunan terminal kargo serta *overlay* landasan pacu, itu sampai sejauh mana progresnya.

Untuk KPPU Pak. Kita mengetahui kendala KPPU adalah dalam hal *law enforcement* atau penegakan hukum. Sampai saat ini Pak, kendala yang paling substantif atau yang paling sulit dilakukan oleh KPPU tuh kayak apa? Sehingga kalau nanti misalnya harus ada revisi Undang-Undang KPPU kita kita menjadi pertimbangan di sana. Lalu tadi dikatakan Juli 2020 itu sudah tidak bisa menindaklanjuti laporan-laporan yang ini, karena anggarannya habis, lalu Juli ke sana, Juli sampai Desember ini tindak lanjut, tindak lanjut perkara yang dilaporkan itu kayak apa? Ini pengen pengen apa, mengetahui kondisinya, sehingga mungkin Komisi VI ketika itu *real* dan fakta yang yang argumentatif, saya pikir bisa ditambah anggaran untuk Juli sampai Desember nya jadi berapa ini.

Lalu BPKS Sabang. Saya pikir memang anggaran yang perlu ditingkatkan di 2021 ini, karena ada rencana rencana besar, kan tapi ini tergantung nanti Pimpinan sama komisi sambil BPKS Sabang menyakinkan kepada kita, bagaimana anggaran itu nanti bisa ya menciptakan *income* atau menghasilkan *income* yang yang mungkin signifikan bagi bagi negara.

Saya pikir itu.

Terima kasih Pak Bimo dan teman-teman sekalian.

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Muhammad Toha sehat-sehat saja di Sukoharjo.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Insya Allah Sehat.

KETUA RAPAT:

Selain kita olahraga, tidur dan makan sehat itu, adalah jamu kondisi psikis yang riang Pak, itu daya imun, itu korelatif terhadap gitar-gitar yang ada di tempatnya Pak Muhammad Toha.

Selanjutnya kami persilakan Pak Muhammad Toha sudah, Pak Deddy Sitorus, kemudian sebelum Pimpinan ke Pak Hendrik, saya cukupkan dulu untuk nambah penanya Pak Hendrik baru kemudian Pak Martin.

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak Bimo, sebelum Pak Martin aku yo.

KETUA RAPAT:

Tapi satu menit Pak ya.

Silakan Pak Hendrik.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati dan Para mitra kerja yang diundang pada hari ini KPPU lalu apa, Batam dan Sabang, yang pertama.

Ijinkan saya untuk menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua, semoga tahun baru membawa harapan baru bagi bangsa ini dan terutama bagi Komisi VI.

Bapak Ibu yang saya hormati,

Saya hanya pertanyaan kepada Ketua KPPU sebenarnya, tapi ini sebenarnya lebih bersifat percikkan perenungan Pimpinan kepada kami di Komisi VI, kenapa? Karena sepertinya pasca putusan *predatory pricing* yang memenangkan Semen Indonesia kemarin itu, kemudian membuat orang punya harapan tentang eksistensi dan peran KPPU. Tapi kalau kita mengamati secara jeli sebenarnya keputusan KPPU itu kita semua tahu apa itu kan keputusan yang tidak punya kekuatan eksekutorial.

Jadi hanya menyenangkan telinga saja, menyenangkan mata untuk dibaca, tapi riilnya itu tidak ada daya paksa terhadap keputusan itu. Nah apa salah dengan situasi ini, ini bukan salah KPPU juga sebenarnya, salah undang-undang. Undang-undang yang diusulkan oleh Komisi VI tempo hari, Undang Undang Nomor 5 Tahun 99, itu tidak memberi kewenangan eksekutorial kepada KPPU. Nah ini salah satu contoh Pimpinan dan kawan-kawan sekalian, bahwa di samping saat ini kita sementara prioritaskan untuk revisi Undang-Undang BUMN, saya memohon perhatian Komisi VI untuk juga menaruh perhatian serius untuk upaya merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena menurut saya banyak perkembangan hukum hari ini yang normanya itu membutuhkan diatur dalam undang-undang, *predatory pricing* itu satu-satu fenomena saja, tapi fenomena yang lain misalnya ada kebutuhan untuk prenotifikasi untuk *merger*, konsolidasi dan akuisisi misalnya.

Ya, lalu *wishtle blower*, orang-orang yang bekerja sama untuk membongkar terjadinya praktek kartel, oligopoli dan sebagainya. Itu kan

mestinya bisa diatur juga dalam undang-undang apa namanya, revisi Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini, lalu ekstrateritorial juga. Ini kan di negara maju sebenarnya Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini normanya sudah sangat maju sekali. Justru menurut saya di Indonesia norma hukum kita sudah ketinggalan sekali. Nah pilihannya ada pada kita sekarang, apakah kita mau membiarkan hukum kita terlambat oleh perkembangan masyarakat? Ataukah kita mengambil satu langkah politik yang konkrit untuk mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang Larangan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Saya kira itu pikiran saya di tahun baru ini Pimpinan kepada Komisi VI,
Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kami persilakan dari meja pimpinan, Pak Martin. Oh Pak Nusron.

F-PG (NUSRON WAHID):

Terima kasih Pak, saya nyambung Pak Hendrik, Pak Kurnianya ke mana ya Pak ya?

WAKIL KETUA KPPU (GUNTUR SYAHPUTRA SARAGIH):

Sudah berganti Pak, periode kita sudah setengah berjalan dan kita sudah punya ketua

F-PG (NUSRON WAHID):

Sekarang Bapak ya Ketua?

WAKIL KETUA KPPU (GUNTUR SYAHPUTRA SARAGIH):

Ketua Pak Kordat dan saya Wakilnya Ketua Pak.

F-PG (NUSRON WAHID):

Oh Ketuanya Pak Kodrat, Kurnia ganti sekarang?

Baik Pak, terima kasih.

WAKIL KETUA KPPU:

Pak Kurnia tidak Ketua lagi Pak.

F-PG (NUSRON WAHID):

Sudah 21 tahun keberadaan KPPU. Saya melihat hampir semua masalah-masalah korupsi, baik yang kemudian diperiksa oleh KPK maupun diperiksa oleh Kejaksaan maupun Tipikor, Polisi, Bareskrim, itu adalah persekongkolan tender, yang itu sebetulnya adalah ranah dari KPPU untuk membongkar adanya persekongkolan tender. Di samping apa tadi yang disampaikan oleh Pak Hendrik, sudah 21 tahun juga, suku bunga bank kita itu tiga kali lebih dari tingkat inflasi dasar, di negara-negara maju tidak ada suku bunga itu sampai dua kali tingkat inflasi.

Kalau tingkat inflasi kita 3% suku bunganya maksimal harus 6%, di Indonesia suku bunganya 3,5% orang kredit masih 11 sampai di 12%. Berarti apa? Ada tingkat, ada tingkat inefisiensi maupun tingkat usaha yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat, dalam industri keuangan kita yang itu mengakitnya *dead weight lose* dan itu kemudian ditanggung oleh konsumen, bukan ditanggung oleh produsen.

Nah saya ingin meminta raport Pak, selama 21 tahun keberadaan KPPU ini perkara-perkara KPPU yang ditindaklanjuti oleh KPPU sampai pada penanganan perkara yang muncul karena kajian itu, ada berapa? Yang muncul karena pengaduan itu ada berapa? Karena penanganan perkara di dalam KPPU itu kan ada 2 (dua) jalur. Jalur pertama karena kajian, jalur kedua, karena pengaduan masyarakat.

Tetapi saya menyaksikan dan saya melihat lebih banyak pengaduan masyarakat. Intinya, selama 21 tahun, dengan bahasa kasar saya mengatakan, KPPU lebih banyak dipakai orang, daripada punya agenda sendiri. Kalau KPPU punya agenda sendiri, itu menindaklanjuti perkara yang itu akibat kajian, yang dan itu memang kebutuhan daripada konsumen, dan itu memang adalah kebutuhan daripada ada industri yang tidak sehat dalam sektor tertentu, tapi itu nggak pernah dilakukan.

Semua perkara yang Bapak tangani, termasuk yang terakhir, yang dengan Andre Rosiade itu, masalah semen ya kan. Itu juga saya lihat adalah pengaduan, kemudian ditindaklanjuti, padahal masih banyak keberadaan 21 tahun ini. Saya masih merasakan sebagai Warga Negara Indonesia, suku bunga bank masih mahal, banyak banget barang-barang masih mahal, yang itu disebabkan karena praktek usaha yang tidak sehat, yang mengakit adanya *deadweight lose* yang ditanggung oleh konsumen, bukan ditanggung produsen.

Saya nambah itu saja, di samping alasan eksekutorial, yang disampaikan oleh Pak Hendrik, itu satu sisi, tapi sisi lain memang juga prestasinya juga belum ada, saya lihat dari awal sampai sekarang.

Saya kira itu, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Martin dari meja Pimpinan.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Terima kasih, Mas Bimo.

Saya mau bertanya pertama kepada BP Batam dan kawasan Sabang. Saya dengar diberita pada Januari tahun 2020 itu Sekretaris Menko Perekonomian mengatakan akan mengintegrasikan kawasan perdagangan bebas di Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang, bahkan katanya presiden juga tidak memperpanjang Keppres terkait Bintan dan Karimun. Lalu saat ini kabarnya pemerintah sedang merancang RPP integrasi Batam, Bintan, dan Karimun, dan katanya sudah mencapai tahap akhir.

Nah, Pak pertanyaannya apakah Pak Rudi sebagai Kepala BP Batam sudah diajak dalam penyusunan RPP ini? Apa apakah sudah dimintai masukan, pendapat, dan lain sebagainya? Dan kalau memang ada pendapat, apa pendapat Pak Rudi tentang integrasi ini? Kemudian lebih lanjut, pada Desember yang lalu juga di berita ini, integrasi dari Batam, Bintan, Karimun, juga akan melingkupi Sabang. Nah, apakah kawasan pengembangan pelabuhan Sabang ini sudah tahu perihal hal ini? Dan apa sebenarnya dasar-dasar sehingga harus semuanya ini diintegrasikan karena memang ini sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda .

Nah, kedua kepada KPPU. Hasil dari apa namanya *Omnibus Law* ya yang menegaskan bahwa program kemitraan itu menjadi yang hal yang penting dari perusahaan besar pada UMKM. Bagaimana langkah-langkah KPPU untuk bisa menindaklanjuti ini? Karena kalau kita lihat misalnya pada saat KPPU yang menjatuhkan sanksi kepada Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia atas perlakuan diskriminatif yang merugikan mitra pengemudi non TPI dan individu, ternyata kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga membatalkan.

Nah jadi bagaimana KPPU melihat hal ini dan juga langkah-langkah ke depan? Karena sebenarnya program kemitraan itu sangat baik sebenarnya. Dan apa yang harus kita lakukan untuk sama-sama membuat KPPU juga bisa berperan untuk memastikan bahwa kemitraan ini akan bisa terjadi, apa artinya *real* gitu ya, bukan hanya apa namanya, sekedar peraturan yang kemudian juga tidak bisa di ditegakkan gitu.

Kepada BSN. Saya dapat masukan nih Pak, ini terkait dengan misalnya pembuatan, ini sih memang sudah agak lama, tapi memang kita baru ketemu lagi tapi mungkin ke depan bisa di diapa, diperbaiki. Misalnya contoh dengan pembuat masker yah. Nah jadi ketika ini Covid melanda ini dan masker kemudian ini menjadi kebutuhan banyak orang, banyak industri-industri kecil yang membuat masker kain, lalu kemudian setelah itu apa namanya, *booming* begitu, kemudian BSN membuat kriteria untuk masker-masker ini mendapatkan SNI, yang kemudian banyak dari kriteria itu yang katakanlah mengagetkan atau menyulitkan mereka untuk bisa langsung *follow*.

Nah mungkin ini jadi pelajaran baik dalam prosesnya ya Pak ya, kan sayang sekali ini sekarang ketika masker menjadi kebutuhan pokok dan diserap oleh pasar, terus kemudian kita kembali dibanjiri lagi oleh masker-masker impor. Nah yang saya pakai ini pun bukan masker Indonesia nih. Nah jadi kalau memang, saya paham bahwa kebutuhan SNI itu untuk menjaga standardisasi ya kualitas dan juga mungkin memenuhi standar kesehatan, tapi mungkin bisa disosialisasikan atau diajak mereka berembuk ya untuk bisa mereka diberi kesempatan memenuhi standar ini gitu loh Pak, jadi bukan ujug-ujug kita buat satu standar, yang kemudian malah lebih bisa dipenuhi oleh pelaku-pelaku usaha dari luar negeri. Itu saya pikir itu satu pelajaran yang mungkin nanti juga Bapak bisa terangkan, bagaimana strategi ke depan agar SNI ini tidak menjadi *barrier* bagi produk dalam negeri sendiri.

Saya pikir itu Pak.

Makasih Mas Bimo.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kita akan menampilkan beberapa pendalaman, karena saya harus menyelesaikan jam 2 sesuai dengan aturan yang ada. Tambahan dari saya saya kira hampir semuanya sudah ada tadi dari kawan-kawan.

Tambahan saja mengenai BSN Pak ya, standard tetap dipertahankan memang kita ada toleran yang SNI wajib dan yang tidak wajib untuk kain. Tadi Pak Martin sampaikan menjadi gerakan UMKM, karena ada standar masker-masker yang sekarang ini muncul UMKM-UMKM di tingkat kota, kabupaten, desa untuk semakin lebih menyadarkan pemakaian masker nonmedis. Saya kira sudah betul, BSN ada 28 SNI yang ditetapkan terkait dengan Covid-19, itu dipertahankan.

Kemudian juga masukan terkait dengan struktur pasar nih berubah, *consumption* ke pangan, dan ke produk kesehatan. Kita harapkan pantauan KPPU, KPPU untuk tetap melihat ketersediaan di pasar dengan harga yang kompetitif Pak. Ini penting dan lebih latah Pak, lebih banyak sering ngomong Pak ya, *statement-statement* ini rakyat baru butuh, kalau perlu blusukan ngak apa-apa, disebar dulu, blusukan aja, untuk lebih mendengarkan betul-betul bagaimana ketersediaan dan keterjangkauan harga, terutama di persoalan pangan dan kesehatan.

Kita juga ingin mendengar Pak sekarang ini Covid-19 ini kan pandemi dunia, tapi kita mau pingin dapat laporan kerja sama mengenai KPPU di tingkat internasional berkaitan dengan masa Covid ini karena kerja sama ini perlu otoritas persaingan usaha hal-hal yang terkait dengan pertukaran informasi penanganan Covid, terutama di negara ASEAN. Tadi disampaikan barang-barang ini masuk, seperti apa ini, monopolinya, monitornya seperti apa, terutama pertukaran informasi, kerja sama otoritas persaingan usaha di masing-masing negara ASEAN ini, saya kira sudah merupakan suatu keniscayaan, karena karena perkembangan bisnis dan ekonomi yang dilakukan lintas negara ini semakin pesat, sehingga KPPU ini perlu menjadi wasit, wasit anti monopoli di negara, yang mana hal-hal yang menyangkut

monopoli itu kalau mereka mempunyai berbagai hal yang tidak *fair* ya, hancur semua produk-produk kita, walaupun *by product* standard tapi *by proces*. Saya kira KPPU perlu melakukan satu kroscek informasi antar KPPU terutama di negara-negara ASEAN, atau negara-negara yang sudah melakukan *treaty agreement* dengan kita.

Nah kita sangat berharap, jangan sampai pasca pandemi *recovery* ini nanti, terjadi barang-barang, yang kalau orang Jawa bilang membludak Pak, yang direm karena situasi pandemi, pas situasi dibuka, itu akan ada suatu luapan barang-barang yang pesat lintas negara akan masuk ke tempat kita. Nah, kita juga harus bersiap diri menghadapi para pelaku usaha yang melakukan monopoli, atau kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat antar negara-negara itu, antar negara-negara yang melakukan *treaty agreement*. Saya kira perlu ditingkatkan ini sebagai suatu keniscayaan dalam kaitan ASEAN *community* maupun beberapa negara yang kita melakukan *treaty agreement*. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan.

Saya sepakat tadi UMKM perlu mengedukasi Pak, untuk BSN diedukasi Pak, BSN untuk UMKM memang dia belum ngerti, *opo* itu yang namanya standard nasional untuk hal yang menyangkut penjaminan kualitas produk itu yang seperti apa. Seperti proses yang pernah dijelaskan di ruang Komisi VI ini dalam rangka, ya terus terang meningkatkan daya saing yang dijual ke pasar saat ini dan meningkatkan kualitas produk bagi konsumen. UMKM ini betul-betul sekarang ini menjadi satu pilar kita, maka arus uang saat ini, *recovery* ekonomi akan dimulai banyak hal dari UMKM, terutama tadi struktur pasar yang cenderung berubah ke konsumsi makanan dan kesehatan, serta berbagai alat-alat kesehatan yang yang memang diperlukan dalam situasi sekarang.

Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon kawan-kawan dari sekretariat dipaparkan beberapa pendalaman-pendalaman dari Anggota Komisi VI, nanti *closing statement* perlu ada disampaikan, kalau ndak, tertulis, dikirimkan ke kita. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan kita kirimkan ke masing-masing, untuk dijawab secara tertulis ada kurang lebih 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 penanya, ya nanti akan kita kirimkan ke sekretariat dan mohon dijawab secara tertulis, dari atas dari atas.

Tadi yang pertama pendalaman adalah dari Pak Martin Pimpinan, kemudian dari Aria Bima Pimpinan, kemudian dari Andre Rosiade, ada Bu Nevi, kemudian juga ada Herman, Pak Herman Khaeron, dari PKS, dari Pak Subardi, wah saya bacanya agak kesulitan, karena jalannya cepet banget ini. Harusnya saya baca sambil diturun-turunkan gitu. Pak Subandi kemudian ada Pak Hakim, kemudian juga ada Pak Deddy Sitorus, ada tambahan Pak Muhammad Toha, itu kok hanya satu pertanyaan, kemudian Pak Hendrik, juga dari Pak Nusron Wahid. Nanti akan kita sampaikan dan sebelum kita mengambil kesimpulan rapat.

Saya persilakan beberapa hal perlu ditanggapi satu-satu saja yang hadir di sini. Kita mulai dari BSN yang bisa dijawab sekarang sambil *closing statement*.

KEPALA BSN (KUKUH S. ACHMAD):

Terima kasih Bapak Pimpinan dan anggota Komisi VI DPR RI.

Jadi mohon ijin, pertanyaannya cukup banyak dan saya mencatat beberapa kata kunci yang sama, tetapi saya ingin dalam kesempatan yang baik ini menjawab pertanyaan dari Pak Deddy Sitorus, Bapak Pimpinan, terkait dengan filosofi BSN itu apa sebetulnya, karena ini penting untuk jawab jawaban berikutnya.

Jadi berdasarkan amanah Undang-Undang 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Sebenarnya standardisasi dan penilaian kesesuaian atau kita singkat biasanya SPK, itu tujuannya adalah untuk melindungi Bangsa Indonesia dari aspek kesehatan, keamanan dan keselamatan.

Yang kedua adalah untuk meningkatkan daya saing produk nasional baik di pasar nasional, maupun di pasar internasional. Karena mandat itu maka BSN melakukan beberapa strategi di antaranya, ketika Pak Pimpinan tadi menyebut ada SNI wajib, itu adalah salah satu strategi bagaimana Bangsa Indonesia melalui pemerintah melindungi masyarakatnya dengan mewajibkan SNI yang memang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan keselamatan.

Kemudian kita juga mendorong untuk pelaku usaha menerapkan standard, utamanya standard nasional Indonesia, karena untuk peningkatan daya saing. Itu standard menjadi kata kunci yang sangat penting. Oleh karena itu, salah satu strategi yang kita lakukan misalnya untuk meningkatkan daya saing nasional di pasar domestik. Di dalam kita menyusun standard untuk produk-produk yang kita hanya ekspor, sebagian besar produk kita diekspor, diusahakan SNI kita adalah harmonis atau selaras dengan standard internasional, agar mudah diterima di negara tujuan ekspor.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

(suara tidak terdengar)

KEPALA BSN (KUKUH S. ACHMAD):

Indonesia hanya impor, maka SNI itu kita buat agar standar itu memastikan aman barang yang masuk ke Indonesia, bisa melindungi Bangsa Indonesia. Ada skenario yang ketiga adalah ketika ada barang yang kita ekspor, tetapi juga ada yang impor, di situlah kita bermain standar nasional Indonesia kita. Kita buat dengan apa yang kita sebut dengan istilah *national difference*. Jadi kita membuat kekhasan standard nasional Indonesia untuk memastikan produk yang masuk dalam tanda petik bisa melindungi industri dalam negeri.

Ini kira-kira gambar besarnya Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ok.

KEPALA BSN (KUKUH S. ACHMAD):

Dan terkait dengan yang kita apa namanya, tugas yang harus kita emban, memang yang paling besar pangasanya adalah UMKM. Jadi tadi banyak pertanyaan terkait UMKM.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ijin Pimpinan.

KEPALA BSN (KUKUH S. ACHMAD):

Menurut.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ijin Pimpinan, sebelum dilanjutkan.

Nah, saya kan kalau itu tadi memang dimaksudkan untuk melindungi Bangsa Indonesia dan memastikan apa namanya, *competitive advantage* kita. Saya pengen tahu sampai sejauh ini, ini kan bisa masuk jadi semacam apa namanya, *non-trade barrier* ya, juga gitu loh. Nah, saya pengen tahu Pak, mungkin dikasih contoh-contoh ceritanya bagaimana itu sudah berhasil dilakukan oleh BSN atau apalagi yang perlu kita lakukan supaya menjadi lebih lebih efektif dalam melakukan tugas dan fungsi itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya nanti diuraikan contoh-contoh seperti Pak Deddy minta dijawab tertulis Pak.

KEPALA BSN (KUKUH S. ACHMAD):

Siap Bapak nanti akan kami sampaikan dalam jawaban tertulis. Mohon ijin sedikit memberikan konsep terkait UMKM, karena tadi Pak Pimpinan juga menyampaikan apa konsep BSN untuk menangani UMKM.

Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan kendala yang dialami UMKM kita adalah utamanya biasanya biaya sertifikasi.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Ijin Ketua, Ketua ijin Ketua, Herman.

KETUA RAPAT:

Saya harus ngatur jam 1 Pak.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Ya saya singkat saja, saya singkat saja.

KETUA RAPAT:

Ya, nanti di Rapat Kerja ini, khusus anggaran ini.

F-PD (DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Justru saya lebih *to the point* tadi, bagaimana kalau BSN memberikan atau membuat program yang langsung kepada UMKM. Ini kan daya dukung untuk meningkatkan UMKM. Menurut saya ini kok nggak nggak direspon gitu. Kalau nggak direspon, berarti ada apa gitu. Kalau saya minta ini direspon, setuju atau tidak. Kalau nggak, ya nggak, kalau alasannya apa gitu ya. Kalau direspon, berapa target tahun ini.

Saya kira itu yang tadi saya sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau belum bisa dijawab dikaji dulu Pak.

KEPALA BSN (KUKUH S. ACHMAD):

Nanti, nanti semua akan kami jawab Bapak, pertanyaannya secara tertulis, tetapi saya ingin memberikan gambaran besarnya.

Jadi tadi termasuk dari Pak Herman, target misalnya 1.000 UMKM setahun karena pada hakekatnya tugas BSN bukan melakukan sertifikasi terhadap UMKM tapi BSN itu mengakreditasi lembaga yang mensertifikasi. Nanti kita akan coba kaji bagaimana target itu kita kelola karena yang memberikan anggaran itu adalah kementerian lembaga yang punya tugas membina UMKM, ini salah satunya.

Yang terkait halal.

Bapak Ibu sekalian,

Jadi memang di dalam implementasi Undang-Undang 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal tentu BSN punya peran di sana. Dari konsep yang sudah dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Kementerian Agama, akan dipastikan bahwa lembaga pemeriksa halal yang sekarang tidak hanya satu lembaga, diberikan kepada semua.

Yang penting memenuhi persyaratan Undang-Undang 33 atau peraturan perundangan turunannya. Tugas BSN adalah menyusun persyaratannya, SNI untuk halal tuh seperti apa, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah memastikan kompetensi lembaga pemeriksa halalnya, atau lembaga yang melakukan sertifikasi halal, karena itu harus juga

beroperasi sesuai dengan persyaratan standar, ini sudah disepakati antara BSN dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

KETUA RAPAT:

Juga produk haramnya Pak, untuk melindungi umat itu justru yang penting sertifikasi produk haram yang tidak boleh dikonsumsi, itu penting Pak. Karena kadang banyak yang keliru nggak ada label makanan haram, itu penting Pak, supaya terutama naruhnya Pak, kadang dicampur di mal-mal itu. Ya itu kalau yang haram kan harus dipisahkan, tapi siapa yang mensertifikasi soal produk haram itu, karena Umat Muslim kan terbesar Pak, harus. Kalau yang halal kan banyak sekali, Bapak juga harus punya sertifikasi produk haram ini kayak di Singapura, di Koreanya, jelas Pak, ini produk yang tidak bisa dikonsumsi oleh Umat Muslim, ada labelnya Pak, penting juga selain halal tadi.

KEPALA BSN (KUKUH S. ACHMAD):

Bapak Pimpinan kalau masih ada waktu 30 detik untuk merespon terkait dengan masker kain tadi yang disampaikan oleh Pak Martin tadi. Jadi memang betul, ketika awal pandemi kemudian kita dikejutkan kebutuhan masker yang sangat banyak, kemudian banyak pelaku usaha mikro dan kecil terutama berkreasi membuat masker dari kain tapi memang kemudian di awal-awal kebutuhan masker banyak harga melonjak dan sebagainya. Dengan inovasi UMKM kita sebenarnya ingin dorong agar UMKM membuat masker yang bisa efektif mencegah penularan.

Kita sebenarnya intinya adalah memberikan referensi atau panduan kepada UMKM. Kalau mau membuat masker dari kain yang bisa mencegah sampai sekian persen penularan Covid-19 maka misalnya, karena SNI itu bisa disederhanakan. Artinya, SNI masker kain, misalnya harus dua lapis, minimal dua lapis kain, kain itu harus kain tenun, bukan kain *woven*, sebaiknya tidak berwarna, kalau berwarna putih itu akan lebih baik, tetapi berwarna pun tidak apa-apa yang penting pewarnaannya itu harus dipastikan tidak membahayakan apa namanya, mulut maupun hidung kita yang menempel ke masker langsung.

Jadi sampai hari ini SNI masker kain sifat penerapannya masih sukarela, sukarela jadikan dan ini adalah saya ijin membawa contoh masker dari kain yang secara sukarela diproduksi di suatu usaha kecil di Bandung dan saya lihat dia penjahit kecil tapi menghimpun penjahit-penjahit di sekitarnya dengan produksi yang sangat banyak. Sekarang, sudah dipesan di banyak kementerian, tentu termasuk BSN karena sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Mungkin demikian Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan KPPU singkat.

WAKIL KETUA KPPU (GUNTUR SYAHPUTRA SARAGIH) :

Ya, terima kasih Bapak Pimpinan.

Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Pimpinan, dan Bapak Ibu Anggota Dewan yang sudah memberikan pertanyaan.

Mungkin saya secara singkat saya jawab untuk beberapa sekaligus barangkali pertanyaan dari Bu Nevi, Pak Andre, Pak Muhammad Toha, Pak Herman tentang problem di KPPU. Bapak Pimpinan, tahun ini ada gugatan ke MK dari kumpulan pegawai kami tentang status kelembagaan. Jadi ini memang sudah lama dan MK sudah memberikan jawaban, walaupun tidak dipenuhi namun MK menjawab itu dikembalikan kepada pemerintah.

Artinya diperlukan Perpres untuk bisa memastikan status kepegawaian kami. Problem utama kami adalah kepegawaian kami yang statusnya yang itu bisa berpotensi demotivasi. Pak Topik Ari, Deputi saya sudah puluhan tahun di KPPU, statusnya sekarang tidak jelas dan ini akan menjadi masalah pada akhir nanti periode pensiun. Kami bersyukur, kami masih punya pegawai yang masih loyal dengan keterbatasan ini, jadi tentunya saja kualitas kerja itu sangat didukung oleh semangat kerja dari para pegawai kami.

KETUA RAPAT:

Berapa yang ASN Pak?

WAKIL KETUA KPPU (GUNTUR SYAHPUTRA SARAGIH):

Yang PNS tuh paling ada 4 atau 5 Pak, itu terkait dengan pengelolaan bendahara keuangan negara.

KETUA RAPAT:

Lainnya?

WAKIL KETUA KPPU (GUNTUR SYAHPUTRA SARAGIH):

Tidak Pak, dan itu sudah puluhan tahun. Kami sudah ajukan ke Kemenpan, walaupun ini bukan mitra di kami Pak, Komisi VI yang menjadi mitra kami, namun menteri berganti, status itu belum dapat Pak, hanya karena persoalan kata-kata Sekretariat Jenderal tidak ada dalam Undang-Undang 5 Pak. Kami sudah menanyakan kepada para ahli sekretariat yang dimaksud dalam Undang-Undang 5. Kalau sekarang itu diartikan dengan sekretariat jenderal Pak. Jadi sekretariat jenderal kami tidak diakui sebagai eselon 1 Pak, dan itu sudah tahunan Pak.

Jadi dalam forum ini kalau ditanya apa tantangan. Tentunya tantangan itu adalah bagaimana kami punya pegawai yang punya semangat dan antusias, loyalitas kami sudah yakin kan kami punya. Namun untuk status ini

memang menjadi persoalan Pak. Dahulu penghasilan remunerasi pegawai KPPU tuh di atas ASN dan di atas pegawai swasta Pak. Dahulu kami bisa merekrut lulusan-lulusan kampus-kampus utama. Hari ini dengan status kita yang tidak jelas dan saya harap ini kita dorong Pak mungkin dari Komisi VI sebagai mitra kami yang sangat setia mendukung KPPU, Keputusan MK sudah.

KETUA RAPAT:

Itu nanti masuk dalam amandemen juga ya?

WAKIL KETUA KPPU (GUNTUR SYAHPUTRA SARAGIH):

Menunggu amandemen Pak, itu menjadi alasan Pak, sementara amandemen kan kita tahu sudah.

KETUA RAPAT:

Yang tidak lewat amandemen apa usulannya?

WAKIL KETUA KPPU (GUNTUR SYAHPUTRA SARAGIH):

Perpres Pak.

Jadi dari MK sudah, putusan MK mengatakan itu menjadi di pemerintah domainnya Pak. Artinya di Perpres Pak dan kami sudah buat tim Pak. Ya Pak?

KETUA RAPAT:

Perpres sudah diajukan?

WAKIL KETUA KPPU (GUNTUR SYAHPUTRA SARAGIH):

Sudah, sekitar apa Pak? Lagi lagi proses Pak. Namun kita harap menang nanti dorongan dari Komisi VI, walaupun kepada lintas ke Kemenpan Pak ya. Jadi kalau tadi Pak Muhamand Toha tantangannya, Pak Herman status kepegawaian, status kelembagaan Pak. Kami mungkin karena dulu semangat di Undang-Undang 5 Pak, memang konteksnya saat itu, itu Pak.

Kemudian tentang anggaran Pak, yang saya maksud bulan Juli itu Pak, ini menjadi tantangan Pak. Sampai hari ini kami belum bisa memastikan. Tadi kalau dari Bapak dari BSN sudah bisa memotong yang mana dipotong Pak, kalau kami masih belum tega dan masih belum melihat Pak, bagaimana bisa memotongnya Pak, karena apa? Kami itu ada kewajiban menindaklanjuti laporan Pak. Akan menjadi salah bagi kami kalau laporan pengaduan tidak kami tindaklanjuti.

Tadi menjawab juga Pak Nusron. Benar secara akumulasi 60% lebih perkara kami laporan, namun periode, makin periode ke sini kita makin

berkurang, bahkan di periode kami inisiatif atau yang apa itu lebih lebih banyak dari inisiatif. Namun yang namanya laporan tentu tidak mungkin tidak direspon Pak, siapapun Pak. Jadi untuk klarifikasi *Cons* ditindaklanjuti bukan karena ada Pak Andre, Pak, tapi memang karena alat buktinya cukup. Jadi perkara multinational company tidak hanya *Cons* Pak, ada Grab, ada perusahaan-perusahaan besar lain, perusahaan Jepang, bahkan kalau saya ke Jepang, saya katakan perusahaan Jepang, anda perusahaan anda bagus di anda, tapi di kita melanggar, kalau kita tahu ada Honda, Yamaha Pak. Jadi soal keberanian, bukan soal keberanian, tapi kecukupan alat bukti. Jadi itu mungkin terkait dengan anggaran ini Pak.

Tadi Pak Martin menanyakan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kami itu ditambahin pekerjaan Pak, tapi anggaran kami dipotong Pak, maksudnya makin bukan dipotong Pak, *refocusing* ini Pak. Mungkin sekedar curhat, kami itu bukan lembaga yang ada anggaran modal, beli gedung, beli, tidak Pak. Jadi anggaran kami, kegiatan itu adalah biaya saksi ahli, biaya sidang, untuk persidangan di KPPU memang cukup apa, karena memang harus menjamin *due process of law*.

Jadi ini mungkin yang berbeda dengan kementerian lembaga. Jadi kalau kenyataan kami dipotong 46%, kami masih gak tahu Pak. Kami minggu ini masih harus merapatkan dan belum berani apa atau ujungnya kami tutup kantor bulan Juli Pak. Nggak bisa untuk merespon laporan-laporan, karena laporan itu bisa kapan saja, dan ketika nanti Undang Undang Cipta Kerja ini RPP-nya sudah selesai, tentang kemitraan, itu ada penambahan Pak tugas, dari PP-nya nanti bahkan kita berharap kemitraan.

Jadi di KPPU itu dengan perkembangan Pak, dulu Undang-Undang 5/1999, tahun 2008 Undang-Undang 20, UMKM dan hari ini Undang-Undang Cipta Kerja juga makin menambah penugasan Pak. Namun anggaran kita, kami bersemangat Pak untuk kemitraan UMKM, makanya kami dari komisi sudah membuat perencanaan kemitraan bisa kita kaji menjadi Deputi. Pada periode kami, kemitraan itu dalam konteks hanya pencegahan, di periode kami itu penegakan Pak. Itu mengapa di tahun ini kita banyak penambahan *ouput*, karena pekerjaan kita di 2019 hasilnya di 2020 banyak laporan, banyak perkara masuk, di situ Pak.

Terkait amandemen. Saya terima kasih banget dengan Pak Hendrik Pak. Begini Pak, berbagi saja Pak, memang waktu diskusi dengan otoritas Jepang Pak, tadi menyambut dengan Pak Bimo tentang bagaimana otoritas berbagai negara, ada ungkapan yang sangat menyentuh Pak. Ketika saya katakan kepada mister di Jepang, saya katakan, kalau di ASEAN itu Indonesia yang terdepan lembaga pengawas persaingannya, iya tapi itu dulu, karena undang-undang anda sudah jadul, sudah jaman dulu Pak. Malaysia, Vietnam, Kamboja dulu KPPU Indonesia Pak, lembaga pengawasan Indonesia yang mententor Pak, mententir.

Kita punya pegawai-pegawai yang menjadi tutornya komisioner-komisioner di berbagai negara ASEAN. Namun Jepang mengatakan undang-undangnya sudah jadul. Jadi kata Pak Hendrik tadi beberapa isu yang sudah menjadi *best practice* di berbagai, itu sudah tidak diakomodir lagi Pak, terutama kalau bicara perlindungan terhadap perusahaan, persaingan dengan usaha asing Pak, kita tidak ada ekstra teritori Pak, bagaimana kita.

Belum lagi soal tadi Pak, Bapak Adul Hakim soal *merger* Pak. Kita mau *merger* bagaimana Pak, pencegahan Pak, kita tuh *post* Pak, dalam rezimnya itu *pre*. Kalau *pre* kita bisa mencegah Pak, sebelum orang *merger*, kalau memang undang-undang yang sudah mengatur *pre* Pak. Kita mau mencegah bagaimana kita tuh *post*, mereka *merger* dulu, baru lapor ke kita. Sama juga dengan isu kemarin yang Tokopedia dengan Go-Jek, wartawan apa, kita *post*.

Saya nggak mungkin mengatakan ya mereka *merger* dulu, baru melakukan notifikasi, baru kita nilai. Sementara mungkin Pak Hendrik sangat menguasai Undang Undang Persaingan di berbagai *best practice* itu *pre* dan itu memang menjadi isu di amandemen Pak, *extra territory*, *pre* dan status kelembagaan Pak. Jadi itu saja Pak, mungkin jawaban *overall* dari saya, Pak tentang sosialisasi kemitraan.

Pak Subardi, kita lihat dulu Pak ya, dengan 46% Pak, saya belum tahu Pak yang mana yang mau dicoret minggu ini Pak, dan moga-moga paska bulan Juli ini masih bisa beroperasi Pak, itu saja barangkali.

Untuk Pak Martin soal Grab Pak. Kita kasasi Pak. Jadi memang dalam perkembangannya kita memang dikasasi, di PN kita kalah, dikasasi probabilitasnya lebih besar Pak, kita dimenangkan, walaupun nanti di Undang-Undang Cipta Kerja nanti ke Niaga Pak.

Itu saja barang kali Pak Aria Bima, Pak Pimpinan. Saya kembalikan kepada Pimpinan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Pak Muhammad Rudi dan Pak Iskandar Zulkarnain apakah ada yang mau disampaikan atau langsung tertulis?

KEPALA BPKS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAIN):

Pak Ketua Komisi VI, saya minta satu saja, untuk disampaikan dari Pak Deddy Sitorus dengan Pak Herman, juga dari untuk memajukan PPKS. Banyak aturan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Bebas Sabang. Kemudian *Omnibus Law* itu memihak ke kita, dalam arti kata *Omnibus Law* mengukuhkan Sabang sebagai kawasan bebas, itu aja Pak Aria Bima. Jadi untuk ke depan dibantu Sabang untuk bisa maju, undang-undang atau peraturan menteri itu karena harus dibatalkan, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Iskandar.

Selanjutnya Pak Muhammad Rudi.

KEPALA BP BATAM (MUHAMMAD RUDI):

Ijin Pimpinan, secara pertanyaan keseluruhan nanti kita (*suara terputus-putus*) ada beberapa hal yang saya pikir pada kesempatan ini, terutama tentang (*suara terputus-putus*).

KETUA RAPAT:

Pak Rudi karena gangguan komunikasi kita, nanti mohon bisa dijawab secara tertulis saja, suara Pak Rudi tidak terdengar di sini. Nanti nanti mohon ada jawaban-jawaban tertulis yang pertanyaannya sudah kita kirim, atau kita kirim lewat sekretariat.

Bapak, Ibu dan Saudara sekalian,

Saya ucapkan terima kasih dan kita akan masuk ke kesimpulan rapat hari ini. Kami persilakan sekretariat untuk menampilkan *draft* kesimpulan rapat, apakah sudah bisa ditampilkan.

Draft Kesimpulan Rapat, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi DPR RI dengan Kepala BSN, dengan Kepala BP Batam, dan dengan dengan Kepala BSN, Kepala BP Batam dan dengan Kepala BPKS dan Ketua KPPU, ya, tentang pembahasan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 dan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2021, Selasa 19 Januari 2021.

A. Badan Standardisasi Nasional

Komisi VI DPR RI mengapresiasi Badan Standardisasi Nasional terkait realisasi penyerapan anggaran Rp246.863.909.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp245.297.832.349,- atau 99,37% dan mendorong Badan Standardisasi Nasional untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.

Saya bacakan yang kedua, belum saya ketok dulu.

2. Komisi VI DPR RI menerima Pagu anggaran BSN Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan surat Menteri Keuangan S-30/MK.02/2021 tentang *refocusing* dan realokasi anggaran untuk melakukan penghematan, realokasi anggaran sebesar Rp37.192.199.000,- atau sebesar 14% sehingga anggaran Badan Standardisasi Nasional menjadi sebesar Rp228.803.934.000,-.

Selanjutnya kesimpulan ketiga untuk BSN.

3. Komisi VI DPR RI meminta kepada BSN untuk meningkatkan kualitas UMKM dengan cara mengedukasi para UMKM untuk melakukan standarisasi produk mereka sehingga bisa menjamin kualitas produk, meningkatkan daya saing produk yang dijual, dan meningkatkan produk bagi konsumen.

Masih ada 4 gak BSN?

Tiga, apakah kesimpulan 1, 2, 3 untuk BSN bisa kita setuju?

KEPALA BSN (KUKUH S. ACHMAD):

Bapak Pimpinan sedikit, *spelling*-nya Pak Pimpinan, yang Badan Standardisasi itu pake D, standardisasi.

KETUA RAPAT:

Standard, standardisasi ya.

KEPALA BSN (KUKUH S. ACHMAD):

Itu saja Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kesimpulan ketiga, tentunya koordinasi dengan menteri-menteri terkait Pak ya, setuju ya, UMKM. Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

B. Mengenai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam, terkait realisasi penyerapan Rp2.198.161.902.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.693.496.603.568,- atau 77,4% terdiri dari program dukungan manajemen sebesar Rp1.009.564.608.000,- atau 76,71% dan program pengembangan kawasan strategis sebesar Rp.1.188.537.294.000,- atau 77,33% dan mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas Batam atau BP Batam meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.

2. Komisi VI DPR RI menerima penggunaan anggaran tahun 2021 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp2.014.200.000.000,- untuk program dukungan manajemen sebesar Rp816.738.405.000,- dan program pengembangan kawasan strategis sebesar Rp1.197.461.595.000,-.

Bisa disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

C. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang dan Pelabuhan Bebas Sabang.

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam BPKS terkait realisasi penyerapan Pagu Anggaran sebesar Rp110.143.715.000,- dengan realisasi anggaran apa dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :
 - a. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebesar Rp71.730.783.000,- atau 65,12%;
 - b. Untuk dukungan manajemen Rp36.205.211.000,- atau 81,76%;
 - c. Perencanaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang Rp55.525.272.000,- atau 53,94%.

Selanjutnya Komisi VI DPR RI mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.

Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Kok naik lagi.

KEPALA BPKS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAIN):

Pimpinan, mohon ijin untuk satu koreksi.

KETUA RAPAT:

Silahkan Pak Rudl.

KEPALA BPKS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAIN):

Dari BPKS Bapak Pimpinan, terkait penulisan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, point satu.

KETUA RAPAT:

Pelabuhan Bebas, dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang satu ya.

KEPALA BPKS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAIN):

Untuk point C-nya Pak Pimpinan, BPKS itu point C yang paling atas judul-judul paling atas. BPKS itu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan, Bebasnya hilang.

KETUA RAPAT:

Dan, betul. D, D-nya mana, oh 2 hah. Sudah, D-nya sudah, dua sudah? Sudah semua. Tadi sudah semua kan?

2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Tahun Anggaran 2021 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebesar Rp94.978.297.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dukungan Manajemen sebesar Rp40.717.950.000,-;
- b. Pengembangan Kawasan Strategis terdiri dari Rupiah murni sebesar Rp51.001.489.000,-

Kenapa, maksudnya apa?

KEPALA BPKS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAIN):

Koreksi Pimpinan. Ijin, koreksi, dari BPKS Sabang.

KETUA RAPAT:

Ya.

KEPALA BPKS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAIN):

Untuk point B, nilainya Rp54.260.307.000,-

KETUA RAPAT:

Udah benar nilainya Rp54.260.307.000,-

KEPALA BPKS SABANG (ISKANDAR ZULKARNAIN):

Correct, bener sekali.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Komisi VI DPR RI mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang meningkatkan kinerja-kinerjanya, meningkatkan kinerja anggaran, kinerjanya, apa itu, agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.

Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Oh cuma 114 miliar ya. Kemarin berapa? Jadi persaingan usahanya ini semakin *fair* ya kalau Covid ya. *Refocusing* bagaimana? ini waktunya kena berapa sih, *refocusing* berapa? 50 26? Tapi ini yang anu dulu ya, yang 2020 udah kan, udah kan diketok yang dulu kan, tinggal realisasi.

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait realisasi penyerapan anggaran tahun anggaran 2020 sebesar Rp114.053.530.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp113.294.248.713,- atau 9 atau sebesar 99,33%.
2. Komisi VI DPR RI menerima Pagu Anggaran KPP tahun Anggaran 2001 sesuai dengan surat, surat *opo*, surat Menteri Keuangan S-30/MK.02/2021 tentang *refocusing*, *refocusing* dan relokasi anggaran sebesar Rp95.641.297.000,- ini yang, *refocusingnya* ini yang, yang yang KPPU masih mikir, berapa sih itu, 22 miliar.

Kawan-kawan Banggar mohon nanti dicermati, dimasukkan dalam catatan rapat. intinya bahwa KPPU masih ingin mempertimbang, masih mengusulkan ya, masih mengusulkan lewat Komisi VI untuk *refocusing* ini dipertimbangkan untuk kembali ke anggaran semula, atau tidak sebesar itu ya. Itu catatan rapat.

WAKIL KETUA KPPU (GUNTUR SYAHPUTRA SARAGIH) :

Pimpinan, terkait dengan RPP Pimpinan. Kalau nanti jadi, dalam waktu dekat kita ditambahin tugas dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja, tentunya tugas tentang terkait dengan kemitraan UMKM Pimpinan, turunan Undang-Undang Cipta Kerja dan pastinya akan berlakukan, kan kita tidak bisa menolak tugas itu dengan anggaran yang makin terbatas terutama kegiatan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terus kesimpulannya apa ini, yang dua.

Komisi IV DPR RI, tapi kau sudah ajukan ini Pak, yang sekarang diajukan, bisa 95 ini, kayak apa ini. Enggak, yang KPPU apa? Dokumen, saya enggak mau, dokumennya apa? Tadi. Catatan keberatannya ada, ada gak catatan untuk *refusing refocusing* ini? Ada kan? Jangan sampai tidak ada, tak kasih catatan, anda tidak melampirkan nanti dinotulensinya dikira inisiasi dari, dari, halaman? Mana sih KPPU? Mana KPPU, apa Pak, bahasanya apa.

Ketiga, target output Program Pengawasan Persaingan Usaha baik pusat maupun daerah sulit untuk dipenuhi dengan adanya penghematan anggaran ini, hal itu dikarenakan sebagian besar tugas pokok bla bla bla telah melakukan pelayanan publik yang diprioritaskan untuk. Gak ada, implisit aja, eksplisitnya nggak ada untuk keberatan terhadap *refocus refocusing* mana, nggak ada kan, oh ini, gimana ini, ini apa ini, oh jawaban tertulis, oh ini mana-mana maka sebagian besar kegiatan pada program pengawasan bla bla bla ditunda pelaksanaannya dan pelaksanaan amanat pada kegiatan prioritas

tidak dapat dipenuhi sesuai dengan target. Bla bla bla tersebut berdampak langsung terhadap pagu kegiatan terhadap penghematan.

Enggak ada, dia menjelaskan saja *refocusing*, untuk itu kami mohon untuk adanya, bukan surat tugas ini, tidak pemotongan *refocusing* ini untuk tidak dilaksanakan, nggak ada ya toh. Bahwa itu mengganggu kegiatan ya, ada nggak kata-kata yang eksplisit bikin ada gak, saya gak berani saya. Gak ada. Gak ada kan, suruh tertulis lagi aja ya Pak ya. Dibikin tertulis satu lembar lagi, yang intinya seperti diuraikan tadi, bahwa argumentasi terganggunya ini, KPPU meminta untuk hal yang terkait dengan *refocusing* ini, *refocusing* ini untuk dikembalikan pada angka semula, mengingat ada tambahan kegiatan dari *Omnibus Law* tadi, terkait dengan Cipta Kerja. Satu lembar ya.

Ini sementara tak ginikan dulu, Komisi VI DPR RI sementara menerima Pagu anggaran KKPU dari 2021 ya kan, terus dikasih koma, selanjutnya akan mengusulkan adanya perubahan terhadap *refocusing*, ngono ya dikasih koma ya, bisa ya, masuk ya.

Selanjutnya, oke ini tetap, tetap seperti ini, terus hal yang terkait catatan rapat, ada ya, hal yang terkait dengan keberatan kami persilakan KPPU mengirimkan surat ke Menteri Keuangan, tembusan ke Komisi VI, ya catatan rapat.

Saya kira itu, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Wes, jadi nanti dari tembusan itu nanti kita pakai untuk memproses di forum politiknya, yang ini saya masih mengacu dari dari dokumen, ya kan, kemudian selanjutnya kami persilakan Komisi VI mempersilahkan KPPU mengusulkan pada Menteri Keuangan tembusan Komisi VI ya. Gak bisa rapat, saya rapat saya nggak ada dokumennya, ini dalam proses kayak gini, kalau ada apa-apa kita diangkat sedokumen-dokumennya Pak, jangan, karena kita hanya bisa memutuskan tapi untuk usulannya, itu harus dari pemerintah.

The patron, *decision*-nya begitu, kalau sekarang di sini dokumennya menerima ya kan, walaupun ada beberapa hal yang mengganggu konsekuensi keniscayaan pemotongan, tapi kalau saya meminta untuk itu saya masukkan dalam kesimpulan rapat meminta kepada KPPU untuk mengusulkan perubahan *refocusing* itu ke Kementerian Keuangan, nanti yang jadi masalah kita, kok bisa-bisanya saya mengusulkan untuk itu di Komisi, gak ada dokumennya, kecuali hari ini ada dokumennya Pak.

Iya toh, gak ada dokumennya. Kalau ada apa-apa berita acara akan dibuka, inisiasinya dari mana ini, pengusulan ini Pak. Tapi dalam catatan rapat saya gak apa-apa. Dalam catatan kami persilakan kalau ada Ketua KPPU menginginkan perubahan *refocusing* ini terlalu tinggi karena ada beban, kami persilakan untuk kirim surat dan di-CC-kan ke kita supaya kita bisa bawa ke keputusan politik, sampai kapan sih pembahasan ini, sebelum ke Banggar besar, masih nanti, secepatnya saja Pak.

Saya kira itu kawan-kawan terkait dengan kesimpulan rapat, apakah masih ada, turunkan lagi, cukup.

(RAPAT : SETUJU)

Bapak, Ibu dan Saudara-saudara sekalian,

Demikian rapat kita pada siang hari ini terkait dengan, terkait dengan rapat hari ini, terkait dengan hal-hal yang menyangkut, ini apa sih ini, kok beda sama yang atas nih, konsepsi rapat mana, Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Standardisasi Nasional, terkait dengan pengawasan Komisi Pengawasan Pengawas Persaingan Usaha, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Untuk itu setelah kesimpulan rapat kita putuskan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala BSN, Wakil Ketua KPPU, Kepala BP Batam dan Kepala BPKS yang telah hadir. Dan dari rapat hari ini kita sudah menyetujui mengambil kesimpulan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan realisasi anggaran tahun 2020 dan rencana kegiatan tahun 2021, yang sudah dipaparkan, dialami, dan disimpulkan. Dan selanjutnya berkaitan dengan beberapa catatan rapat, seperti tadi ada usulan dari KPPU, untuk hal yang terkait dengan surat Menteri Keuangan *refocusing* anggaran KPPU, KPPU akan mengusulkan kembali kepada Menteri Keuangan karena adanya tambahan tugas berkaitan dengan *Omnibus Law*.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari mitra kerja dan saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan Anggota Komisi VI yang hadir secara fisik maupun secara virtual, sekalian keinginan kita untuk situasi ini tetap tidak mengganggu kinerja kita dan kami terima kasih telah mengikuti rapat dengan sabar maka dengan demikian rapat saya nyatakan selesai dan kami tutup.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaratu.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.27 WIB)

Jakarta, 19 Januari 2021
a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E.,M.Si
NIP.197104071992032001